



LAPORAN

KINERJA INSTANSI PEMERINTAH DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA



PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

Pengantar

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah pada Dinas komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2024 merupakan salah satu pertanggungjawaban formal Dinas Komunikasi dan Informatika sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Capaian kinerja yang termuat dalam laporan ini merupakan realisasi kinerja dari target-target kinerja yang telah diperjanjikan dalam Penetapan/Perjanjian Kinerja. Keberhasilan pelaksanaan kegiatan tersebut dapat dicapai oleh Dinas Komunikasi dan Informatika karena adanya komitmen seluruh unit kerja di lingkungan Kabupaten Tanjung Jabung Timur dalam mendukung visi dan misi Kabupaten Tanjung Jabung Timur yaitu Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat.

Disamping komitmen tersebut, peningkatan akuntabilitas dan kinerja operasional Dinas Komunikasi dan Informatika juga didukung dengan motivasi yang tinggi dan kerja keras seluruh staf Dinas Komunikasi dan Informatika, unit kerja dan seluruh stakeholder.

Akhir kata semoga Laporan Kinerja Dinas komunikasi dan Informatika Tahun 2024 ini dapat bermanfaat untuk menentukan arah kebijakan dan program serta kegiatan DISKOMINFO pada masa yang akan datang.

Muara Sabak, 31 Januari 2025

Kepala,



Herman Toni, S.E, M.E

NIP. 19780420 200212 1 005

Ringkasan eksekutif

Pelaporan akuntabilitas kinerja tahun 2024 dimaksudkan untuk menginformasikan Capaian Kinerja dalam tahun 2024 yang dikaitkan dengan proses pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

Capaian kinerja tersebut menggunakan tolak ukur pada Penetapan/Perjanjian Kinerja tahun 2024 yang merupakan bentuk komitmen penuh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

Berdasarkan Rencana Kinerja tahunan 2024 terdapat 3 (tiga) sasaran dengan 5 indikator keberhasilan.

I. Capaian sasaran strategis 1 “Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Berbasis Elektronik”:

- Diukur melalui Nilai Indeks SPBE yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.
- Capaian indikator Nilai Indeks SPBE didukung oleh kinerja 2 (dua) Program, yakni Program Pengelolaan Aplikasi Informatika dan Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi.
- Target capaian indikator sasaran tahun 2024 dengan indeks 2,6 sampai dengan bulan Desember 2024 terealisasi indeks 2,83. Dengan demikian capaian ini telah melampaui target. Prosentase realisasi terhadap target (capaian dibagi target dikalikan 100%) mencapai 109%.
- Hasil evaluasi eksternal yang dilakukan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, indeks SPBE tahun 2024 melalui Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 663 Tahun 2024 tentang Hasil Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah Tahun 2024, Pemkab Tanjung Jabung Timur memperoleh Indeks 2,83 dengan predikat “Baik”.
- Tahun 2023 hasil Indeks SPBE oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi sebesar 2,81. Bila dibandingkan dengan tahun 2023 nilai indeks SPBE Pemkab Tanjung Jabung Timur yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi ada peningkatan sebesar 0,02.

II. Capaian sasaran strategis 2 “Peningkatan Pelayanan Publik, Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan”:

- Diukur dengan 3 Indikator yaitu nilai IKM yang diselenggarakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika secara mandiri, sedangkan Indikator Predikat AKIP dan Indikator Laporan Keuangan sesuai dengan SAP di selenggarakan oleh Inspektorat Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
- Capaian indikator dimaksud didukung oleh kinerja 1 (satu) Program, yakni Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.
- Target capaian sasaran indikator nilai IKM tahun 2024 sebesar 88,30, sampai dengan bulan Desember 2024 terealisasi dengan nilai sebesar 88,30. Dengan demikian capaian ini telah mencapai target. Prosentase realisasi terhadap target (capaian dibagi target dikalikan 100%) mencapai 100%.
- Target capaian sasaran indikator predikat AKIP tahun 2024 yakni ‘B’ dengan nilai 70 , sampai dengan bulan Desember 2024 terealisasi dengan Predikat ‘BB’ perolehan nilai sebesar 74,61. Dengan demikian capaian ini telah mencapai target. Prosentase realisasi terhadap target (capaian dibagi target dikalikan 100%) mencapai 100%.
- Bila dibandingkan dengan tahun 2023 nilai Predikat AKIP Dinas Komunikasi dan Informatika yang dikeluarkan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung timur mengalami penurunan sebesar 3,3 masih dalam Predikat yang sama yakni ‘BB’.

III. Capaian sasaran strategis 3 “Peningkatan Kualitas keterbukaan Informasi publik”:

- Diukur dengan Predikat Keterbukaan Informasi Publik yang diselenggarakan oleh Komisi Informasi Provinsi Jambi.
- Capaian indikator dimaksud didukung oleh kinerja 2 (dua) Program, yakni Program Informasi dan Komunikasi Publik dan Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral .
- Target capaian indikator sasaran tahun 2024 Cukup Informatif dengan skor 79,9, sampai dengan bulan Desember 2024 terealisasi dengan Predikat Informatif dengan skor 97,5. Dengan demikian capaian ini telah melampaui target.
- Tahun 2023 Pemkab Tanjung Jabung Timur mengikuti Keterbukaan Informasi Publik berada pada urutan ke 3 dengan skor nilai 93,56 untuk Badan Publik kategori Pemerintah Kab/Kota Hasil Monev Keterbukaan Informasi Publik tahun 2024 mengalami kenaikan urutan dari 3 ke 2 kategori Pemerintah Kab/Kota.

Evaluasi atas pencapaian kinerja dan permasalahan yang ditemui pada setiap sasaran menunjukkan beberapa tantangan yang perlu menjadi perhatian bagi Dinas Komunikasi, Informatika Kabupaten Tanjung Jabung Timur antara lain yaitu:

1. Perlu adanya komitmen kuat dari segenap jajaran pimpinan untuk dapat melakukan implementasi SPBE diseluruh perangkat daerah yang sesuai dengan aturan yang berlaku.
2. Memaksimalkan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan berbasis Elektronik
3. Memaksimalkan Dukungan anggaran untuk sarana dan prasarana pelayanan akses internet perkantoran dan kecamatan serta Pengembangan SDM di bidang TIK
4. Memaksimalkan Dukungan Anggaran untuk belanja Publikasi (Media) dan Mengoptimalkan Peralatan peliputan publikasi penyelenggaraan dan pembangunan pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
5. Mengoptimalkan perangkat daerah dalam memahami pentingnya penggunaan layanan persandian untuk keamanan informasi dalam pelayanan informasi publik pemerintah
6. Melaksanakan Sosialisasi terkait Data statistik Sektoral kepada Produsen Data dan Pengembangan SDM di bidang Pengelolaan Data dan Statistik Sektoral

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
RINGKASAN EKSEKUTIF	ii
DAFTAR ISI.....	iii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Maksud dan Tujuan	1
1.3 Gambaran Umum dan Aspek Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika	2
1.4 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi.....	3
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA.....	9
2.1 Perencanaan Strategis	9
2.1.1 Pernyataan Visi,Misi,Tujuan dan Sasaran	9
2.1.2 Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah.....	12
2.1.3 Strategis, Program dan Kegiatan.....	13
2.2 Perjanjian Kinerja Tahun 2024	14
2.3 Rencana Anggaran Tahun 2024.....	15
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	17
3.1 Capaian Kinerja Organisasi	17
3.1.1 Realiasi dan Capaian Kinerja Tahun 2024	17
3.1.2 Realiasi dan Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan Tahun Lalu dan beberapa Tahun terakhir	19
3.1.3 Realiasi dan Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra	19
3.1.4 Realiasi dan Capaian Kinerja Tahun 2023 dengan Standar Nasional....	20
3.1.5 Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang telah dilakukan	20
3.2 Realisasi Anggaran	33
3.3 Inovasi.....	37
3.4 Penghargaan.....	37
BAB IV PENUTUP	38
Lampiran	

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Setiap instansi pemerintah berkewajiban menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) secara periodik sebagai bentuk pertanggungjawaban atas penggunaan anggaran yang bersumber dari APBD dan /atau APBN pada upaya mencapai tujuan dan sasaran organisasi yang sudah ditetapkan pada Perjanjian Kinerja

Good governance merupakan persyaratan bagi setiap instansi Pemerintah guna mempertanggung jawabkan kinerja yang *akuntabel*, oleh karena itu perlu penerapan sistem pertanggung jawaban kinerja yang standar dengan tepat, jelas dan terukur yang harus didasarkan pada ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku. Selanjutnya Dinas Komunikasi dan Informatika telah menetapkan Rencana Strategis, Penetapan Kinerja dan Pengukuran Kinerja.

1.2 Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun Anggaran 2024 adalah untuk memberikan gambaran tentang pelaksanaan pemerintah yang lebih berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, sedangkan Tujuannya mencakup hal-hal sebagai berikut:

1. Aspek akuntabilitas kinerja bagi keperluan eksternal organisasi, sebagai sarana pertanggungjawaban institusi atas capaian kinerja yang di peroleh selama tahun 2024.
2. Aspek manajemen kinerja bagi keperluan internal organisasi, sebagai sarana evaluasi pencapaian kinerja oleh manajemen Dinas Komunikasi dan Informatika untuk upaya-upaya perbaikan kinerja dimasa datang. Untuk setiap celah kinerja yang ditemukan, manajemen Dinas Komunikasi dan Informatika dapat

merumuskan strategi pemecahan masalah, sehingga capaian kinerjanya dapat ditingkatkan secara berkelanjutan.

3. Dorongan terciptanya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagai salah satu prasyarat untuk tercapainya pemerintah yang baik dan terpercaya.

1.3 Gambaran Umum dan Aspek Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika

Dinas Komunikasi dan Informatika adalah Perangkat Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan kewenangan daerah di bidang Pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi serta melaksanakan tugas pembantuan yang diberikan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi dimana dalam setiap kegiatannya selalu berhubungan dengan pembangunan dan pengembangan sistem Informasi, pengembangan dan pemeliharaan jaringan intranet/internet, pengelolaan informasi dan publikasi, penyampaian data statistik serta pengelolaan persandian untuk pengamanan informasi.

Seiring dengan peningkatan pelayanan dan pengelolaan sumberdaya yang tersedia dalam kerangka otonomi daerah dan *good governance*, maka institusi teknis bidang Komunikasi dan Informatika di pandang penting untuk terus dikembangkan dan ditingkatkan. Oleh karena itu, Berdasarkan Undang- Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 6 tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah serta Peraturan Bupati Tanjung Jabung Timur Nomor 11 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah, pada bulan Januari tahun 2017 Dinas Komunikasi dan Informatika terbentuk sebagai OPD baru yang dalam tugas pokok dan fungsinya melaksanakan tiga urusan yaitu Urusan Komunikasi dan Informatika, Urusan Statistik dan Urusan Persandian.

Aspek strategis Dinas Komunikasi dan Informatika dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya merupakan perkembangan teknologi informasi dalam menciptakan pemerintahan berbasis e-gov menjadikan tantangan sekaligus peluang pada pengembangan jaringan prasarana dan jaringan pelayanan informasi dan komunikasi yang terpadu, efektif dan efisien.

Adapun Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan dalam pengembangan TIK karena dampaknya yang signifikan di masa depan. Suatu kondisi atau kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau apabila tidak dimanfaatkan akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang. Isu strategis diperoleh dari analisis internal berupa identifikasi permasalahan pembangunan maupun analisis eksternal berupa kondisi yang menciptakan peluang dan tantangan pada lima tahun mendatang. Berdasarkan identifikasi permasalahan serta memperhatikan analisis terkait dengan tantangan dan peluang, faktor pendorong dan penghambat, serta hal-hal yang berkaitan dengan pengembangan TIK Kabupaten Tanjung Jabung Timur jangka menengah, maka dapat ditetapkan isu strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanjung Jabung Timur yaitu :

1. Era digitalisasi sebagai peluang daerah untuk pembangunan system digital yang mendukung percepatan kemajuan daerah;
2. Penyelenggaraan pelayanan publik yang mengacu kepada asas kepatuhan terhadap standar pelayanan publik, kemampuan peningkatan inovasi dan peningkatan kualitas pelayanan publik, serta penyiapan portal pengaduan atas penyelenggaraan pelayanan publik;
3. Terintegrasinya berbagai system pelayanan baik masyarakat maupun untuk penyelenggaraan pemerintahan;
4. Perlunya pengembangan jaringan informatika dan jaringan telekomunikasi untuk mendukung penyelenggaraan pelayanan publik berbasis TIK;
5. Mengoptimalkan saluran komunikasi publik untuk mendorong masyarakat memanfaatkan layanan berbasis TIK yang telah tersedia.

1.4 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

Untuk melaksanakan tugas dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika telah diatur dengan peraturan yang ada yaitu Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati Tanjung Jabung Timur Nomor 11 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah.

Tugas

Secara umum Institusi Dinas Komunikasi dan Informatika mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Komunikasi dan Informatika. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanjung Jabung Timur memiliki tugas teknis sebagai berikut :

1. Penyiapan rumusan kebijakan teknis di bidang Komunikasi dan Informatika
2. Pelaksanaan Pengelolaan Informasi Kabupaten Tanjung Jabung Timur
3. Pelaksanaan Layanan Infrastruktur e-Government
4. Pelaksanaan Kerjasama di Bidang Komunikasi dan Informatika
5. Pelaksanaan Evaluasi dan Pelaporan bidang Komunikasi dan Informatika

Secara spesifik tugas Dinas Komunikasi dan Informatika dapat dilihat berdasarkan urusan yang terbagi menjadi bidang tugas, sebagai berikut :

1. Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik

Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik mempunyai tugas melaksanakan penyiapan Koordinasi, fasilitasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan pengelolaan opini dan aspirasi publik dilingkup pemerintah daerah, pengelolaan informasi untuk mendukung kebijakan nasional dan pemerintah daerah pelayanan informasi publik di kabupaten, layanan infrastruktur dasar data center, layanan hubungan media, penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik dan penyediaan akses informasi, layanan nama domain dan sub domain bagi lembaga, pelayanan publik dan kegiatan Kabupaten, pengembangan sumber daya TIK Pemerintah Kabupaten dan masyarakat, layanan pengembangan intranet dan penggunaan akses internet serta layanan pengembangan dan pengelolaan aplikasi generik, spesifik dan suplemen yang terintegrasi.

2. Bidang Layanan e - goverment

Bidang Layanan E-Government mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi, fasilitasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan Layanan Manajemen Data Informasi e-government, Integrasi Layanan Publik dan Kepemerintahan, layanan Keamanan Informasi e-Government, Layanan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Kabupaten, Pengembangan Sumber Daya TIK pemerintah Kabupaten dan masyarakat serta Penyelenggaraan Government Chief Information Officer (GCIO) Pemerintah Kabupaten, Penyelenggaraan Ekosistem TIK Smart City di Kabupaten.

Fungsi

Secara umum Dinas Komunikasi dan Informatika merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan daerah dibidang Komunikasi dan Informatika yang memiliki fungsi meliputi :

1. Perumusan kebijakan teknis dibidang Komunikasi dan Informatika.
2. Penyelenggaraan pengelolaan opini dan aspirasi publik di lingkup Pemerintah Daerah, pengelolaan informasi untuk mendukung kebijakan nasional dan pemerintah daerah pelayanan informasi publik di Kabupaten.
3. Penyelenggara layanan infrastruktur dasar data center, disaster recovery center dan TIK pemerintah kabupaten, layanan pengembangan intranet dan penggunaan akses internet, layanan pengembangan dan pengelolaan aplikasi generik, spesifik dan suplemen yang terintegrasi, layanan manajemen data informasi e-government, integrasi layanan publik dan pemerintahan, layanan keamanan informasi e-government, layanan sistem komunikasi intra pemerintah kabupaten.
4. Penyelenggaraan layanan hubungan media, penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik dan penyediaan akses informasi, layanan nama domain dan sub domain bagi lembaga, pelayanan publik dan kegiatan Kabupaten pengembangan sumber daya TIK pemerintah Kabupaten dan masyarakat penyelenggaraan Government Chief Information Officer (GCIO) Pemerintah Kabupaten, Penyelenggaraan Ekosistem TIK Smart City di Kabupaten.
5. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah di bidang komunikasi dan informatika.
6. Pelaksanaan administrasi Dinas Komunikasi dan informatika.
7. Pelaksanaan fungsi lain yang terkait bidang Komunikasi dan informatika yang diberikan oleh Bupati.

Struktur Organisasi

Dalam melaksanakan tugas pokok, fungsi dan Struktur Organisasi, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanjung Jabung Timur memiliki sumber daya manusia sebanyak 17 orang pegawai yang terdiri atas 6 orang pejabat struktural, 5 orang jabatan fungsional tertentu, 6 fungsional pelaksana dan dibantu oleh 28 orang Pegawai Honorer Tidak Tetap yang terdiri dari 4 Orang Tenaga

Teknisi E-Gov, 3 Orang Programmer, 3 Orang Kehumasan, 14 Orang Tenaga Administrasi Kantor/Operator Komputer, 2 Orang Petugas Kebersihan serta 2 Orang Penjaga Kantor.

Jumlah pegawai Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanjung Jabung Timur berdasarkan tingkat Pendidikan Pada tahun 2024 dapat dilihat pada Tabel berikut:

Tabel 1.1

Jumlah PNS dan CPNS Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Tanjung Jabung Timur Berdasarkan tingkat pendidikan
Tahun 2024

NO	PENDIDIKAN	STATUS KEPEGAWAIAN		JUMLAH	%
		CPNS	PNS		
1	SD	0	0	0	0
2	SMP	0	0	0	0
3	SMA	0	3	3	18
4	D3	0	2	2	12
5	S1	0	9	9	53
6	S2	0	3	3	18
JUMLAH		0	17	17	100

Dilihat dari tabel 1.1 berdasarkan tingkat pendidikan tersebut diatas, Pegawai Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanjung Jabung Timur belum menunjang didalam melaksanakan tugas, pokok dan fungsinya, karena masih kurangnya jumlah personil fungsional pelaksana dalam melaksanakan bidang komunikasi dan informatika, dengan tingkat pendidikan terdiri atas : SD sebesar 0 %, SMP sebesar 0 %, SMA sebesar 18%, D3 sebesar 12%, S1 sebesar 53% dan S2 sebesar 18%.

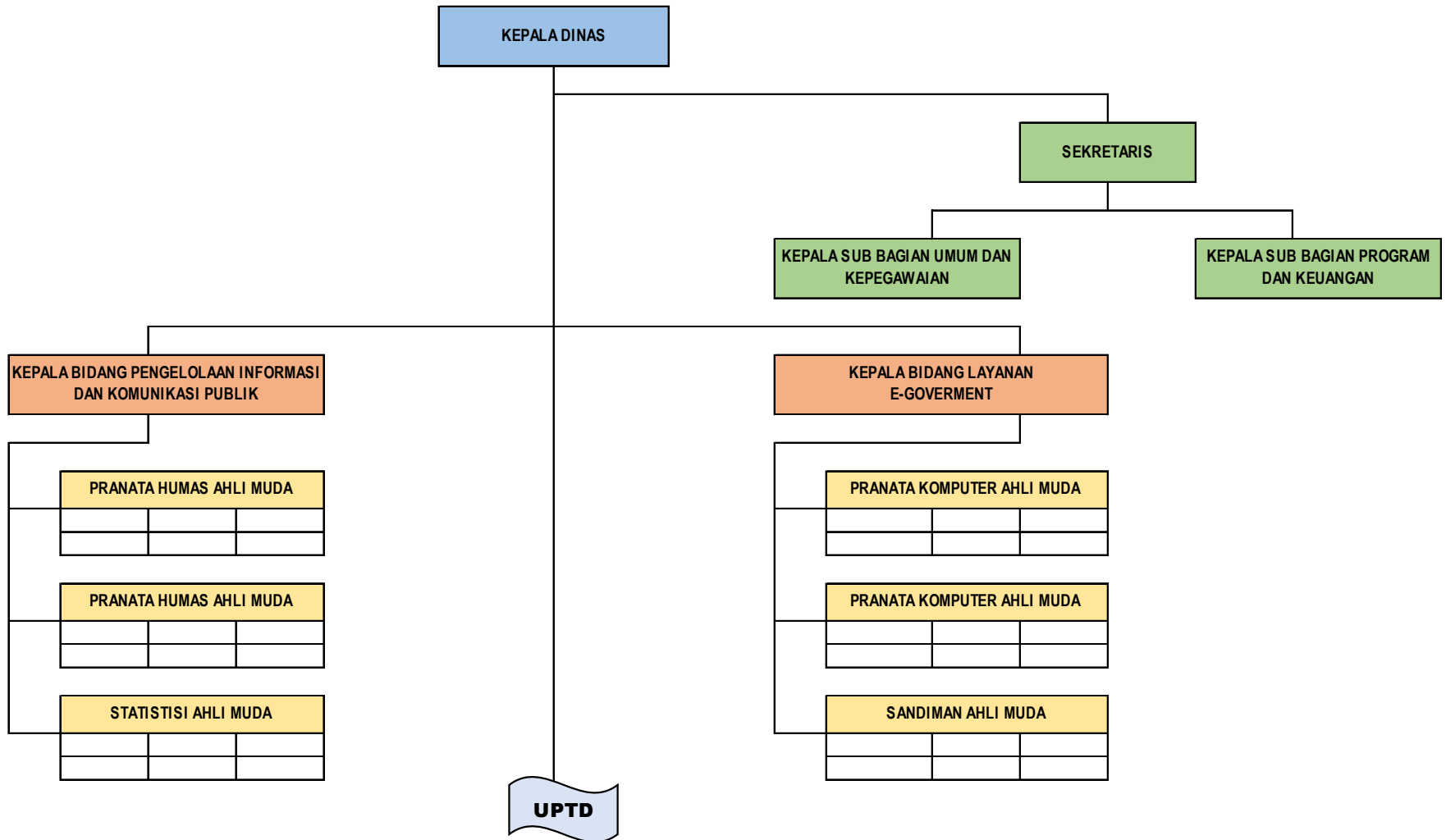
Berikut jumlah Pegawai Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanjung Jabung Timur berdasarkan pangkat/golongan dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 1.2
Pegawai Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Berdasarkan Tingkat Golongan
Tahun 2024

NO	GOLONGAN	STATUS KEPEGAWAIAN		JUMLAH	%
		CPNS	PNS		
1	Golongan I	0	0	0	0
2	Golongan II	0	2	2	12
3	Golongan III	0	12	12	71
4	Golongan IV	0	3	3	18
JUMLAH		0	17	17	100

Berdasarkan Tabel 1.2 pegawai Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanjung Jabung Timur berdasarkan golongan terdiri atas Golongan I sebanyak 0%, Golongan II sebanyak 12%, golongan III sebanyak 71%, golongan IV sebanyak 18%, melihat komposisi tersebut, pegawai Dinas Komunikasi dan Informatika banyak ditempati oleh golongan III, dilain sisi Dinas Komunikasi dan Informatika memerlukan tambahan pegawai golongan II dan III untuk tenaga administrasi dan tenaga konseptor. Struktur Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanjung Jabung Timur secara jelas dapat dilihat pada gambar 1.1.

Gambar 1.1
Struktur Dinas Komunikasi dan Informatika berdasarkan Perbup Kabupaten Tanjung Jabung Timur No 11 Tahun 2022



BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

2.1 Perencanaan Strategis

Rencana Strategis adalah dokumen perencanaan perangkat daerah periode jangka menengah. Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2021-2026 merupakan manifestasi komitmen dalam mendukung tujuan pembangunan jangka menengah daerah dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi yang didasarkan pada analisis isu-isu strategis dan permasalahan pembangunan daerah. Renstra memuat tujuan, sasaran dan strategi bagi penyelenggaraan program dan kegiatan di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang harus dilaksanakan secara terpadu, sinergis, harmonis dan berkesinambungan. Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2021-2026 ditetapkan melalui Peraturan Bupati Tanjung Jabung Timur Nomor 63 tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021--2026.

2.1.1 Pernyataan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran

Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2021-2026 dijabarkan dalam Tujuan dan Sasaran Pemerintah Daerah yang selengkapnya dapat dilihat dalam bagan cascade RPJMD Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2021-2026 sebagai berikut:

Tabel 2.1

Ringkasan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2021-2026

Visi : “Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Merakyat)”

No	Misi	Tujuan/Sasaran	Indikator	Formulasi	Kondisi Awal	Target					
						2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Mewujudkan Masyarakat Sejahtera Yang Bertumpu Pada Sektor Pertanian dan Perikanan	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi Sektor Pertanian dan Perikanan	Laju Pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian Kehutanan dan Perikanan	Data BPS	2,76	3,23	3,78	4,33	4,88	5,43	6,00
2	Membangun Sumberdaya Manusia Yang Unggul dan Berdaya Saing	Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Sehat	Indeks Kesehatan	$IK = (UHH - UHH \text{ Min}) / (UHH \text{ Maks} - UHH \text{ Min})$	0,687	0,688	0,69	0,691	0,692	0,693	0,695
		Mewujudkan Sumber Daya Manusia Yang Cerdas	Indeks Pendidikan	$IP = (HLS + Rata2 \text{ Lama Sekolah}) / 2$	9,43	9,52	9,61	9,7	9,79	9,88	9,97
		Menciptakan Tenaga Kerja yang Berdaya Saing	Rasio Kesempatan Kerja	Data BPS	71,53	71,54	71,56	71,57	71,59	71,60	71,61
3	Meningkatkan Investasi Daerah yang Kompetitif dan Lestari	Meningkatnya Nilai Investasi Daerah	Persentase Peningkatan Nilai Investasi PMDN/PMA	Target Tahun n/Total Target x 100	0	0	5,4	5,7	10,53	11,54	11,79
		Meningkatnya Daya Serap Tenaga Kerja	Rasio Daya Serap Tenaga Kerja	Data TPAK	74,18	74,18	75,282	76,384	77,486	78,588	79,69
		Menjamin Keberlangsungan Pembangunan Berwawasan Lingkungan	Rasio Ketaatan Izin Lingkungan, Izin PPLH, dan PUU LH	Jumlah Perusahaan yang Taat izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH dibagi total Perusahaan x 100	100	100	100	100	100	100	100

No	Misi	Tujuan/Sasaran	Indikator	Formulasi	Kondisi Awal	Target					
						2021	2022	2023	2024	2025	2026
4	Mewujudkan Reformasi Birokrasi Guna Peningkatkan Pelayanan Publik dalam Tataan Kehidupan Yang Nyaman dan Harmonis	Membangun birokrasi yang tangguh, terampil dan berintegritas	Indeks Reformasi Birokrasi	Penilaian MenpanRB	NA	C	CC	CC	B	B	B
		Peningkatan Pengawasan, Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	Maturitas SPIP	Penilaian BPKP	Level 2	Level 2	Level 2	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3
			Indeks Perencanaan	Survey	NA	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	Sangat Baik
			Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Penilaian Menpan RB	NA	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	Sangat Baik
			Nilai SAKIP	Penilaian Menpan RB	CC	B	B	B	B	B	BB
			Opini BPK	Penilaian BPKP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
		Menciptakan Kondisi Daerah yang Aman, Nyaman dan Harmonis	Indeks Rasa Aman	Survey	NA	0,49	0,5	0,51	0,52	0,53	0,54

Dilihat dari Tujuan dan Sasaran Pemerintah Daerah tersebut diatas sesuai dengan tugas dan fungsi pokoknya Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanjung Jabung Timur mendukung pencapaian sasaran Pemerintah daerah yaitu Peningkatan Pengawasan, akuntabilitas Kinerja dan Keuangan dengan indikator Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.

2.1.2 Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

Tujuan jangka menengah yang akan dicapai oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanjung Jabung Timur dalam rangka pencapaian Visi dan Misi pembangunan jangka menengah selama Tahun 2021-2026 yaitu Meningkatkan Penyelenggaraan Pemerintahan Berbasis Elektronik, Meningkatnya Pelayanan Publik Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan dan Meningkatnya Pelayanan Informasi dan Komunikasi Publik .

Adapun Sasaran yang akan dicapai selama kurun waktu lima tahun adalah sebagai berikut :

Tabel 2.2

Sasaran Strategis Dinas komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanjung Jabung Timur

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET					
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Berbasis Elektronik	Nilai SPBE	2,6	2,6	2,6	2,6	3,5	3,5
2	Peningkatan Pelayanan Publik, Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	Nilai IKM	78	81	84	88,3	90	93
		Predikat AKIP	B	B	B	B	BB	BB
		Lap. Keuangan Sesuai SAP	Sesuai	Sesuai	Sesuai	Sesuai	Sesuai	Sesuai
3	Peningkatan Kualitas Keterbukaan Informasi Publik	Predikat Keterbukaan Informasi Publik	Cukup Informatif	Cukup Informatif	Cukup Informatif	Cukup Informatif	Menuju Informatif	Menuju Informatif

Tabel 2.3**IKU Dinas komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanjung Jabung Timur**

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Formula	Target					
					2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Meningkatkan Penyelenggaraan Pemerintahan Berbasis Elektronik	Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Berbasis Elektronik	Indeks SPBE	1. Domain Kebijakan SPBE dengan Aspek Kebijakan Internal Tata Kelola SPBE 2. Domain Tata Kelola SPBE yang terdiri dari 3 Aspek yaitu: Aspek Perencanaan Strategis SPBE, Aspek Teknologi Informasi dan Komunikasi, dan Aspek Penyelenggara SPBE 3. Domain Manajemen SPBE yang terdiri dari 2 Aspek yaitu: Aspek Penerapan Manajemen SPBE dan Aspek Pelaksanaan Audit TIK 4. Domain Layanan SPBE yang terdiri dari 2 Aspek yaitu: Aspek Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik dan Aspek Layanan Publik Berbasis Elektronik	2,6	2,6	2,6	2,6	3,5	3,5
2	Meningkatnya Pelayanan Publik, Akuntabilitas Kinerja dan	Peningkatan Pelayanan Publik, Akuntabilitas Kinerja dan	Nilai IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat)	Survey	78	81	84	88,3	90	93
			Predikat Akuntabilitas Kinerja (AKIP)	Penilaian Inspektorat	B	B	B	B	BB	BB
			Laporan Keuangan Sesuai SAP	Penilaian Bekeuda	Sesuai	Sesuai	Sesuai	Sesuai	Sesuai	Sesuai
3	Meningkatnya Pelayanan Informasi dan Komunikasi Publik	Peningkatan Kualitas keterbukaan Informasi publik	Predikat Keterbukaan Informasi Publik	Penilaian Komisi Informasi	Cukup Informatif	Cukup Informatif	Cukup Informatif	Cukup Informatif	Menuju Informatif	Menuju Informatif

2.1.3 Strategis, Program dan Kegiatan

Setelah menentukan tujuan dan sasaran adapun Program Kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika mencerminkan tugas dan fungsi yang berisikan kegiatan dan sub kegiatan untuk mewujudkan sasaran strategis yang telah ditetapkan

Tabel 2.4**Sasaran Strategis Program dan Kegiatan**

NO	SASARAN STRATEGIS	PROGRAM	KEGIATAN
1	2	3	4
1	Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Berbasis Elektronik	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Pengelolaan E - Government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
		Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
2	Peningkatan Pelayanan Publik, Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
			Administrasi Umum Perangkat Daerah
			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
3	Peningkatan Kualitas Keterbukaan Informasi Publik	Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
		Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Penyelenggaraan Statistik Sektoral Di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota

2.2 Perjanjian Kinerja Tahun 2024

Dalam pencapaian visi dan misi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanjung Jabung Timur, untuk mencapai tujuan dan sasaran tersebut perlu dilakukan perjanjian kinerja tahunan sesuai dengan target kinerja dalam pencapaian Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika. Dengan demikian Perjanjian Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanjung Jabung Timur sebagai berikut :

Tabel 2.5
Perjanjian Kinerja Tahun 2024

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
I	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja	Indeks SPBE	Baik
	1 Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Berbasis Elektronik	Nilai SPBE	2,6
II	Meningkatnya Pelayanan Publik dan Budaya Kerja Aparatur	Indeks Pelayanan Publik	3,4
	1 Peningkatan Pelayanan Publik, Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	Skor IKM Nilai AKIP Lap. Keuangan Sesuai SAP	88,3 B Sesuai
	2 Peningkatan Kualitas Keterbukaan Informasi Publik	Predikat Keterbukaan Informasi Publik	Cukup Informatif

No	Program	Anggaran	Keterangan
1.	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	3.533.864.843	APBD Murni 2024
2.	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	1.622.412.200	APBD Murni 2024
3.	Pengelolaan Aplikasi Informatika	1.525.140.500	APBD Murni 2024
4.	Penyelenggaraan Statistik Sektoral	84.800.000	APBD Murni 2024
5.	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi	50.729.400	APBD Murni 2024
Jumlah Anggaran		6.816.946.943	

Pada tahun 2024, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanjung Jabung Timur melaksanakan Perjanjian Kinerja Tahun 2024 dengan 5 program utama yang mendukung sasaran strategis sesuai yang tercantum dalam Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2021-2026 yang ditetapkan melalui Peraturan Bupati Nomor 63 tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026. Dalam berjalannya kegiatan di tahun 2024 telah dilakukan perubahan APBD kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun Anggaran 2024 sehingga pagu anggaran dalam perjanjian kinerja Dinas

Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanjung Jabung Timur mengalami perubahan. Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.6
Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2024

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
I	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja	Indeks SPBE	Baik
	1 Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Berbasis Elektronik	Nilai SPBE	2,6
II	Meningkatnya Pelayanan Publik dan Budaya Kerja Aparatur	Indeks Pelayanan Publik	3,4
	1 Peningkatan Pelayanan Publik, Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	Skor IKM Nilai AKIP Lap. Keuangan Sesuai SAP	88,3 B Sesuai
	2 Peningkatan Kualitas Keterbukaan Informasi Publik	Predikat Keterbukaan Informasi Publik	Cukup Informatif

No	Program	Anggaran	Keterangan
1.	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	3.496.196.952	APBD Perubahan 2024
2.	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	1.912.087.115	APBD Perubahan 2024
3.	Pengelolaan Aplikasi Informatika	1.538.800.900	APBD Perubahan 2024
4.	Penyelenggaraan Statistik Sektoral	85.125.000	APBD Perubahan 2024
5.	Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	49.529.400	APBD Perubahan 2024
Jumlah		7.081.739.367	

2.3 Rencana Anggaran Tahun 2024

Pada Tahun Anggaran 2024 Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanjung Jabung Timur melaksanakan kegiatan untuk pencapaian sasaran dengan rincian target belanja sebagai berikut:

Tabel 2.7
Target Belanja Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2024

No	Uraian	Target Anggaran Murni	Target Anggaran Perubahan
1	Belanja Daerah	6.816.946.943	7.081.739.367
1.1	Belanja Operasi	6.742.573.703	6.923.917.427
1.2	Belanja Modal	74.373.240	157.821.940
1.3	Belanja Tidak Terduga	0	0
1.4	Belanja Transfer	0	0

Tabel 2.8
Target Anggaran Belanja Sasaran Strategis Tahun 2024

No	Sasaran Strategis	Perubahan Anggaran	Persentase	Keterangan
1	Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Berbasis Elektronik	1.588.330.300	22,43%	Anggaran Bidang Layanan e-government
2	Peningkatan Pelayanan Publik, Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	3.496.196.952	49,37%	Anggaran Sekretariat
3	Peningkatan Kualitas Keterbukaan Informasi Publik	1.997.212.115	28,20%	Anggaran Bidang Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Capaian Kinerja Organisasi

Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan/ kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi instansi Pemerintah. Pengukuran dimaksud merupakan hasil dari suatu penilaian yang sistematis dan didasarkan pada kelompok indikator kinerja kegiatan yang berupa indikator masukan, keluaran, hasil, manfaat dan dampak. Penilaian tersebut tidak terlepas dari proses yang merupakan kegiatan mengolah masukan menjadi keluaran atau proses penyusunan kebijakan/ program/ kegiatan yang dianggap penting dan berpengaruh terhadap pencapaian sasaran dan tujuan.

Dengan pengukuran kinerja ini maka akan dapat diambil suatu tindakan yang diperlukan untuk mengevaluasi dan mengoreksi atas program dan kegiatan pada tahun tahun sebelumnya.

Untuk melaksanakan pengukuran kinerja digunakan :

- a. Indikator kinerja pada tingkat sasaran merupakan tolok ukur keberhasilan suatu sasaran.
- b. Indikator kinerja pada tingkat kegiatan terdiri atas ;
 - Indikator Input (Masukan)
 - Indikator output (Keluaran)
 - Indikator outcome (hasil)

3.1.1 Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2024

Pencapaian kinerja sasaran merupakan tingkat pencapaian target dari masing masing indikator sasaran yang telah ditetapkan dalam dokumen rencana kerja. Pengukuran tingkat pencapaian sasaran didasarkan pada data hasil pengukuran kinerja kegiatan.

Capaian kinerja merupakan dasar dalam menilai keberhasilan/kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi.

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanjung Jabung Timur telah melaksanakan penilaian kinerja dengan mengacu pada Perjanjian Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanjung Jabung Timur tahun 2024 yang telah disepakati. Penilaian ini dilakukan untuk mengevaluasi dan mengukur dalam rangka pengumpulan data kinerja yang hasilnya akan memberikan gambaran keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian tujuan dan sasaran. Dari hasil pengumpulan data selanjutnya dilakukan kategorisasi kinerja (penentuan posisi) sesuai dengan tingkat capaian kinerja yaitu:

Tabel 3.1
Skala Nilai Peringkat Kinerja

NO	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
1	$91 \leq 100$	Sangat Baik
2	$76 \leq 90$	Tinggi
3	$66 \leq 75$	Sedang
4	$51 \leq 65$	Rendah
5	≤ 50	Sangat Rendah

Sumber: Permendagri Nomor 86 Tahun 2017

Pencapaian masing-masing sasaran terhadap target yang direncanakan dalam tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.2
Capaian Kinerja Tahun 2024

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	KATEGORI
Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Berbasis Elektronik	Nilai SPBE	2,6	2,83	109	Sangat Baik
Peningkatan Pelayanan Publik, Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	Nilai IKM	88,3	88,3	100	Sangat Baik
	Predikat AKIP	B	BB	100	Sangat Baik
	Lap. Keuangan Sesuai SAP	Sesuai	Sesuai	100	Sangat Baik
Peningkatan Kualitas Keterbukaan Informasi Publik	Predikat Keterbukaan Informasi Publik	Cukup Informatif	Informatif	100	Sangat Baik

3.1.2 Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan Tahun Lalu dan beberapa Tahun Terakhir

Tahun 2024 merupakan tahun keempat dalam pelaksanaan RPJMD Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2021-2026, secara bertahap dan konsisten Dinas Komunikasi dan Informatika telah berupaya untuk mewujudkan tujuannya melalui sasaran strategis dan indikator kinerja sasaran yang telah ditetapkan dalam IKU maupun Perjanjian Kinerja Tahun 2024.

Adapun evaluasi dan analisi tingkat pencapaian kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2024 dan tiga tahun sebelumnya secara rinci disampaikan pada tabel berikut:

Tabel 3.3
Capaian Kinerja Tahun 2024 dan Tiga Tahun Sebelumnya

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2024	REALISASI				CAPAIAN
			2021	2022	2023	2024	
Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Berbasis Elektronik	Nilai SPBE	2,6	1,16	2,6	2,81	2,83	109
Peningkatan Pelayanan Publik, Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	Nilai IKM	88,3	78,62	88,3	84,02	88,3	100
	Predikat AKIP	B	B	B	BB	BB	100
	Lap. Keuangan Sesuai SAP	Sesuai	Sesuai	Sesuai	Sesuai	Sesuai	100
Peningkatan Kualitas Keterbukaan Informasi Publik	Predikat Keterbukaan Informasi Publik	Cukup Informatif	Cukup Informatif	Cukup Informatif	Informatif	Informatif	100

3.1.3 Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan Target Jangka Menengah Dalam Renstra

Realisasi Kinerja Tahun 2024 dan target jangka menengah Dinas Komunikasi dan Informatika yang tertuang dalam pada Dokumen Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika tahun 2021-2026. Secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.4

Perbandingan Capaian Realiasi Kinerja Tahun 2024 dengan Target Akhir Renstra

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2024	REALISASI 2024	TARGET AKHIR RENSTRA	CAPAIAN KINERJA
Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Berbasis Elektronik	Nilai SPBE	2,6	2,83	3,5	80,86
Peningkatan Pelayanan Publik, Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	Nilai IKM	88,3	88,30	93	94,95
	Predikat AKIP	B	BB	BB	100
	Lap. Keuangan Sesuai SAP	Sesuai	Sesuai	Sesuai	100
Peningkatan Kualitas Keterbukaan Informasi Publik	Predikat Keterbukaan Informasi Publik	Cukup Informatif	Informatif	Menuju Informatif	100

3.1.4 Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2023 dengan Standar Nasional

Perbandingan realisasi kinerja sasaran strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2024 dengan Standar Nasional tidak dapat dilakukan analisis karena tidak ada standar nasional yang menjadi acuan untuk pengukuran capaian kinerja sasaran strategis dimaksud.

3.1.5 Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang telah dilakukan

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanjung Jabung Timur telah melaksanakan penilaian kinerja dengan mengacu pada Perjanjian Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanjung Jabung Timur tahun 2024 yang telah disepakati. Penilaian ini dilakukan untuk mengevaluasi dan mengukur dalam rangka pengumpulan data kinerja yang hasilnya akan memberikan gambaran keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian tujuan dan sasaran. Dari hasil pengumpulan data selanjutnya dilakukan kategorisasi kinerja (penentuan posisi) sesuai dengan tingkat capaian kinerja.

Pengukuran target kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanjung Jabung Timur dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja. Indikator kinerja sebagai ukuran keberhasilan dari tujuan dan sasaran strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanjung Jabung Timur beserta target dan capaian realisasinya dirinci sebagai berikut:

Sasaran 1 : Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Berbasis Elektronik

Tabel 3.5

Rumusan Indikator dan Formulasi Perhitungan

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	FORMULA PERHITUNGAN
Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Berbasis Elektronik	Nilai SPBE	1. Domain Kebijakan SPBE dengan Aspek Kebijakan Internal Tata Kelola SPBE 2. Domain Tata Kelola SPBE yang terdiri dari 3 Aspek yaitu; Aspek Perencanaan Strategis SPBE, Aspek Teknologi Informasi dan Komunikasi , dan Aspek Penyelenggara SPBE 3. Domain Manajemen SPBE yang terdiri dari 2 Aspek yaitu; Aspek Penerapan Manajemen SPBE dan Aspek Pelaksanaan Audit TIK 4. Domain Layanan SPBE yang terdiri dari 2 Aspek yaitu; Aspek Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik dan Aspek Layanan Publik Berbasis Elektronik

Indikator Nilai SPBE merupakan indikator yang sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 59 Tahun 2020. Adapun cara penilaian evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik sebagaimana tercantum didalam gambar berikut:

Gambar 3.1

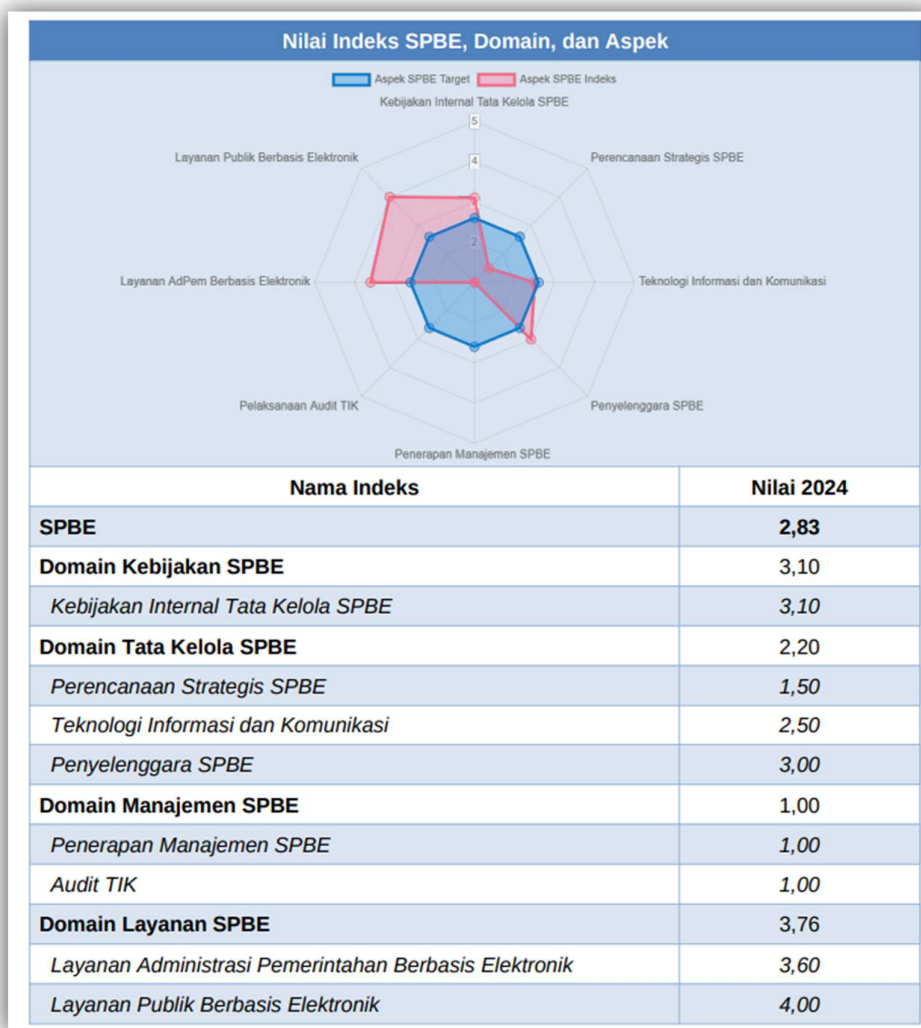
Penilaian dan Tabel Predikat SPBE

Domain dan Aspek Penilaian		Bobot	Predikat Indeks SPBE																				
Domain 1 - Kebijakan SPBE		13%	<table><tr><th>NO</th><th>NILAI INDEKS</th><th>PREDIKAT</th></tr><tr><td>1</td><td>4,2 – 5,0</td><td>Memuaskan</td></tr><tr><td>2</td><td>3,5 – < 4,2</td><td>Sangat Baik</td></tr><tr><td>3</td><td>2,6 – < 3,5</td><td>Baik *)</td></tr><tr><td>4</td><td>1,8 – < 2,6</td><td>Cukup</td></tr><tr><td>5</td><td>< 1,8</td><td>Kurang</td></tr></table> *) Target penilaian: Predikat Baik (indeks minimal 2,6)	NO	NILAI INDEKS	PREDIKAT	1	4,2 – 5,0	Memuaskan	2	3,5 – < 4,2	Sangat Baik	3	2,6 – < 3,5	Baik *)	4	1,8 – < 2,6	Cukup	5	< 1,8	Kurang		
NO	NILAI INDEKS	PREDIKAT																					
1	4,2 – 5,0	Memuaskan																					
2	3,5 – < 4,2	Sangat Baik																					
3	2,6 – < 3,5	Baik *)																					
4	1,8 – < 2,6	Cukup																					
5	< 1,8	Kurang																					
Aspek 1 - Kebijakan Internal Tata Kelola SPBE		13%																					
Domain 2 - Tata Kelola SPBE		25%																					
Aspek 2 - Perencanaan Strategis		10%																					
Aspek 3 - Teknologi Informasi dan Komunikasi		10%																					
Aspek 4 - Penyelenggaraan SPBE		5%																					
Domain 3 - Manajemen SPBE		16,5%																					
Aspek 5 - Penerapan Manajemen SPBE		12%																					
Aspek 6 - Audit TIK		4,5%																					
Domain 4 - Layanan SPBE		45,5%																					
Aspek 7 - Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik		27,5%																					
Aspek 8 - Layanan Publik		18%																					

*) Target penilaian: Predikat Baik (indeks minimal 2,6)

Untuk mencapai sasaran strategis peningkatan penyelenggaraan pemerintahan berbasis elektronik ditetapkan indikator kinerja yakni nilai SPBE. Tahun 2024 menargetkan nilai 2,6 atau dengan predikat “baik”. berdasarkan Surat Keputusan Menteri PAN-RB nomor 663 Tahun 2024 tentang hasil evaluasi SPBE pada Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah Tahun 2024, kabupaten Tanjung Jabung Timur memperoleh nilai 2,83 dengan predikat “baik” penilaian yang di evaluasi untuk tercapainya nilai SPBE Tahun 2024 seperti yang terlihat pada gambar 3.1

Gambar 3.2
Hasil Evaluasi SPBE



Tabel 3.6
Hasil Capaian Sasaran Strategi 1

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Berbasis Elektronik	Nilai SPBE	2,6	2,83	109

Berdasarkan tabel Skala Nilai Peringkat Kinerja, bahwa tahun 2024 persentase capaian kinerja untuk Indikator Nilai SPBE berada di kriteria sangat tinggi. Meskipun demikian secara keseluruhan penerapan aspek SPBE pada Dinas Komunikasi dan Informatika masih perlu perbaikan dan peningkatan dalam penyelenggaraan sistem pemerintah berbasis elektronik di Kabupaten Tanjung Jabung Timur Khususnya pada Dinas Komunikasi dan Informatika.

Adapun Keunggulan penerapan SPBE yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur adalah pada penerapan Aspek Kebijakan Internal Tata Kelola SPBE, Aspek Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik, dan Layanan Publik Berbasis Elektronik. Keunggulan ini terlihat dari adanya Kebijakan Tata Kelola melalui Peraturan Bupati Nomor 73 Tahun 2020 sebagai dasar hukum pengaturan penerapan Manajemen Data dan di dalam kebijakan tersebut juga telah mengatur norma pengaturan penerapan Manajemen Data. Pada Aspek Layanan Administrasi Pemerintahan, pengintegrasian aplikasi seperti e-Office dan Srikandi mendukung pengelolaan administrasi pemerintahan yang lebih baik, yang telah terdokumentasi dan terinventarisasi dengan baik sebagai pengaturan penerapan Layanan Perencanaan, Layanan Penganggaran, Layanan Keuangan, Layanan Pengadaan Barang dan Jasa, Layanan Kepegawaian, dan Layanan Kearsipan Dinamis. Selanjutnya, pada aspek Layanan Publik Berbasis Elektronik melalui penggunaan aplikasi SIAK, dokumen berupa Layanan Pengaduan Publik dan SK Tim SP4N, Peraturan Bupati Tanjung Jabung Timur nomor 2 Tahun 2019 tentang Pengelolaan JDIH, SK Nomor 109 Tahun 2021 tentang Tim Pengelolaan Jaringan Dokumen menjadi bukti dari pengelolaan layanan Pengaduan Pelayanan Publik, Layanan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH), Layanan Publik Sektor 1, Layanan Publik Sektor 2, dan Layanan Publik Sektor 3. Seluruh keunggulan tersebut saling terkait, sehingga dapat memberikan gambaran pelaksanaan SPBE di Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur menjadi efektif dan efisien, baik dari sisi tata kelola maupun layanan secara optimal.

Namun disisi lain, Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur masih terdapat beberapa kelemahan, khususnya pada Aspek Perencanaan Strategis SPBE, Teknologi Informasi dan Komunikasi, Penerapan Manajemen SPBE, Pelaksanaan Audit TIK, dan Layanan Publik Berbasis Elektronik. Pada Aspek Perencanaan Strategis SPBE, belum ditemukan kebijakan internal yang mengatur terkait Arsitektur SPBE, Peta Rencana SPBE, dan Kematangan Keterpaduan Rencana dan Anggaran SPBE. Hal ini menyebabkan rencana penerapan SPBE masih belum terstruktur secara menyeluruh dan terintegrasi. Pada aspek Teknologi Informasi dan Komunikasi, belum diterapkan atau terdokumentasi dalam kaidah kaidah Siklus pembangunan aplikasi terkait pembangunan Aplikasi SPBE. Pada Aspek Penerapan Manajemen SPBE, belum memiliki penerapan manajemen yang mengatur terkait Manajemen Risiko, Manajemen Keamanan Informasi,

Manajemen Data, Manajemen Aset TIK, Kompetensi Sumber Daya Manusia, Manajemen Pengetahuan, Manajemen Perubahan, dan Manajemen Layanan SPBE. Hal ini mengindikasikan bahwa penerapan manajemen SPBE di Kabupaten Tanjung Jabung Timur masih kurang optimal, khususnya dalam hal pengelolaan dan mitigasi risiko serta penguatan kapasitas SDM. Selanjutnya, pada Aspek Pelayanan Audit TIK, pelaksanaan audit pada infrastruktur SPBE, aplikasi SPBE, dan keamanan SPBE masih belum mengacu dan selaras dengan Peta Rencana SPBE sehingga hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan audit di Pemerintahan Kabupaten Tanjung Jabung Timur masih belum terpenuhi. Terakhir, pada Aspek Layanan Publik Berbasis Elektronik, belum menunjukkan adanya mekanisme validasi/persetujuan dan analitika data pada indikator kematangan layanan data terbuka, hal ini menunjukkan bahwa layanan publik berbasis elektronik masih belum sepenuhnya optimal.

Keberhasilan capaian Sasaran 1, dengan Indikator Indeks SPBE dengan nilai indeks 2,83 dengan predikat “Baik” tersebut didukung oleh keberhasilan program, kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut:

Tabel 3.7
Capaian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan terhadap Sasaran 1

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6=5/4*100)
1	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Persentase Aplikasi yang terintegrasi	75	75	100
		Persentase Sarpras Pendukung SPBE	100	100	100
1.1	Kegiatan Pengelolaan E - Government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Aplikasi yang terintegrasi	1	1	100
		Jumlah Sarpras Pendukung SPBE	1	1	100
1.1.1	Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	100
1.1.2	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Jumlah Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik yang Dikembangkan	1 Aplikasi	1 Aplikasi	100
2	Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	Persentase Keamanan Sistem Informasi	32,56	58,14	178,56
2.1	Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Perangkat Daerah yang menggunakan Sertifikat Elektronik	14 OPD	25 OPD	178,57
2.1.1	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	1 Laporan	1 Laporan	100

Program Pengelolaan Aplikasi Informatika juga memiliki 2 (tiga) indikator program yaitu :

(1) Persentase aplikasi yang terintegrasi

Pada indikator program Persentase aplikasi yang terintegrasi ,dari target 75% terealisasi sebesar 75% sesuai dengan target yang telah ditentukan. Pencapaian ini diperoleh dari pengintegrasian aplikasi dari tahun 2023 sampai dengan tahun 2024 Dinas Komunikasi dan Informatika berhasil mengintegrasikan aplikasi dari target akhir 3 aplikasi.

Metadata :

Jumlah aplikasi yang terintegrasi = 3

Jumlah rencana aplikasi yang terintegrasi= 4

Formula Penghitungan

(Jumlah aplikasi yang terintegrasi dibagi Jumlah rencana aplikasi yang terintegrasi) x 100%

Hasil Perhitungan = $3/4 \times 100\% = 75$

(2) Persentase Sarpras pendukung SPBE

Pada indikator program Sarpras pendukung SPBE,dari target 100% terealisasi sebesar 100% sesuai dengan target yang telah ditentukan. Pencapaian ini diperoleh dari jumlah Sarpras pendukung SPBE tahun 2024 Dinas Komunikasi dan Informatika telah memiliki sarana dan prasarana pendukung sebanyak 3 unit yang terpelihara dengan baik.

Metadata :

Jumlah sarana dan prasarana pendukung SPBE = 3

Jumlah rencana sarana dan prasarana pendukung SPBE = 3

Formula Penghitungan

(Jumlah sarana dan prasarana pendukung SPBE dibagi Jumlah rencana sarana dan prasarana pendukung SPBE) x 100%

Hasil Perhitungan = $3/3 \times 100\% = 100$

Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota memiliki 1 (satu) indikator program yaitu :

(1) Presentase Keamanan Sistem Informasi

Pada indikator program Persentase Keamanan Sistem Informasi ,dari target 32,56% terealisasi sebesar 58,14% melebihi dari target yang telah ditentukan. Pencapaian ini diperoleh dari Keamananan Sistem Informasi tahun 2024 melalui penggunaan serifikat elektronik pada Perangkat Daerah dari target akhir 14 Perangkat Daerah terealisasi sebanyak 25 perangkat daerah pengguna sertifikat elektronik.

Metadata :

Jumlah Perangkat daerah yang menggunakan sertifikat elektronik = 25

Jumlah Perangkat Daerah = 43

Formula Penghitungan

(Jumlah Perangkat daerah yang menggunakan sertifikat elektronik dibagi Jumlah Perangkat Daerah) x 100%

Hasil Perhitungan = $25/43 \times 100\% = 58,14$

Faktor Pendukung Keberhasilan

1. Pengembangan Infrastruktur TIK dengan Jaringan Fiber Optik dan Radio
2. Adanya Pelatihan Pengelola website Perangkat Daerah

Faktor Penghambat Keberhasilan

1. Pemanfaatan Sistem Aplikasi Elektronik dalam penyelenggaraan pemerintah yang belum maksimal
2. Dukungan anggaran untuk sarana dan prasarana pelayanan akses internet perkantoran dan Kecamatan yang masih belum optimal serta kurangnya pengembangan SDM di bidang TIK
3. Kurang optimalnya perangkat daerah dalam memahami pentingnya penggunaan layanan persandian untuk keamanan informasi dalam pelayanan informasi publik pemerintahan.

Sasaran 2 : Peningkatan Pelayanan Publik, Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan

Tabel 3.8

Rumusan Indikator dan Formulasi Perhitungan

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	FORMULA PERHITUNGAN
Peningkatan Pelayanan Publik, Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	Nilai IKM	Survey
	Predikat AKIP	Penilaian Inspektorat
	Lap. Keuangan Sesuai SAP	Penilaian Bakeuda

Tabel 3.9

Hasil Capaian Sasaran Strategi 2

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Peningkatan Pelayanan Publik, Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	Nilai IKM	88,3	88,30	100%
	Predikat AKIP	B	BB	100%
	Lap. Keuangan Sesuai SAP	Sesuai	Sesuai	100%

Berdasarkan tabel Skala Nilai Peringkat Kinerja, bahwa tahun 2024 persentase capaian kinerja untuk 3 Indikator diatas berada di kriteria sangat baik. Pada tahun 2024 persentase capaian indikator Nilai IKM telah sesuai dengan target dari capaian sasaran yakni 100% berarti sudah sesuai dengan target yang diinginkan. Hal ini menunjukkan bahwa mutu pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika termasuk kategori **‘B’** sehingga kinerja pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika untuk tahun 2024 dapat dikatakan Baik. Meskipun demikian Dinas Komunikasi dan Informatika senantiasa berkomitmen untuk melakukan perbaikan dan peningkatan kinerja pelayanan publik.

Capaian kinerja pada indikator Predikat AKIP pada tahun 2023 telah melebihi target capaian yakni dengan Predikat BB. Adapun faktor pendorong pencapaian yakni perangkat daerah telah mendapatkan bimbingan teknis dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi terkait penyusunan Laporan Kinerja Perangkat Daerah.

Capaian kinerja pada indikator Laporan Keuangan sesuai SAP pada tahun 2023 telah sesuai target capaian.

Keberhasilan capaian Sasaran 2, dengan Indikator tersebut diatas didukung oleh keberhasilan program, kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut:

Tabel 3.10
Capaian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan terhadap Sasaran 2

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja (%)
-1	-2	-3	-4	-5	(6=5/4*100)
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Indeks Pelayanan Instansi	88,3	88,30	100
1.1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Perangkat	100	100	100
1.1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	2 Dokumen	100
1.1.2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	100
1.1.3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	100
1.1.4	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	100
1.1.5	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	100
1.1.6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 Laporan	2 Laporan	100
1.1.7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	1 Laporan	100
1.2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Penyelesaian Administrasi Keuangan Daerah	100	100	100
1.2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	17 Orang	17 Orang	100
1.2.2	Pelaksanaan Penatausahaan dan Penguji/ Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	100
1.2.3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1 Laporan	100
1.3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Penyelesaian Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100	100	100
1.3.1	Pengadaan Pakain Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakain Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	1 Paket	100
1.3.2	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	6 Orang	5 Orang	83,33
1.4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Penyelesaian Administrasi Umum Daerah	100	100	100
1.4.1	Penyediaan Komponen Instalansi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	1 Paket	1 Paket	100
1.4.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	1 Paket	1 Paket	100
1.4.3	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	1 Paket	1 Paket	100
1.4.4	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undang	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang disediakan	1 Dokumen	1 Dokumen	100
1.4.5	Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	1 Laporan	1 Laporan	100
1.4.6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	1 Laporan	100

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja (%)
-1	-2	-3	-4	-5	(6=5/4*100)
1.5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah	100	100	100
1.5.1	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit	1 Unit	100
1.5.2	Pengadaan Mebel	Jumlah Unit Mebel yang disediakan	11 Unit	11 Unit	100
1.5.3	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan	3 Unit	3 Unit	100
1.6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100	100	100
1.6.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	1 Laporan	100
1.6.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan	100
1.7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah	100	100	100
1.7.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	2 Unit	2 Unit	100
1.7.2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional/ Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	6 Unit	6 Unit	100
1.7.3	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	18 Unit	17 Unit	94,44
1.7.4	Pemeliharaan Rehab Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	100

Program Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota memiliki 1 (satu) indikator program yaitu :

(1) Indeks Pelayanan Instansi

Pada indikator program Indeks Pelayanan Instansi ,dari target 88,3 terealisasi sebesar 88,30 sesuai dengan target yang telah ditentukan. Pencapaian ini diperoleh dari Survey Indeks Pelayanan Instansi tahun 2024 Dinas Komunikasi dan Informatika menunjukan kinerja pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika untuk tahun 2024 dapat dikatakan Baik.

Sasaran 3 : Peningkatan kualitas Keterbukaan Informasi Publik

Tabel 3.11

Rumusan Indikator dan Formulasi Perhitungan

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	FORMULA PERHITUNGAN
Peningkatan Kualitas Keterbukaan Informasi Publik	Predikat Keterbukaan Informasi Publik	Penilaian Komisi Informasi

Tabel 3.12
Capaian Sasaran Strategi 3

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Peningkatan Kualitas Keterbukaan Informasi Publik	Predikat Keterbukaan Informasi Publik	Cukup Informatif	Informatif	100

Predikat Keterbukaan Informasi Publik merupakan indikator yang tidak termasuk di dalam target RPJMD Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2021-2026. Akan tetapi indikator ini merupakan salah satu sasaran Peningkatan Kualitas Keterbukaan Informasi Publik pada dokumen RESTRA Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2021-2026 Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

Analisis Ketercapaian Sasaran Peningkatan Kualitas Keterbukaan Informasi Publik:

- a. Tahun 2023 Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur mengikuti Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik dengan skor nilai 93,56 untuk Badan Publik kategori Pemerintah Kabupaten/Kota yang berada pada urutan ke 3 .
- b. Tahun 2024 berdasarkan Surat Keputusan Komisi Informasi Provinsi Jambi Nomor 003/KEP-KI/JBI/XII/2024 tentang Hasil Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik pada Badan Publik se Provinsi Jambi Tahun 2024, Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur mendapatkan skor 97,5 pada Predikat Informatif atau peringkat ke 2 pada level Pemerintah Kabupaten/Kota, sehingga sasaran Peningkatan Kualitas Keterbukaan Informasi Publik tercapai dan terlampaui tergetnya.
- c. Bila dibandingkan dengan dengan hasil Monev Keterbukaan Informasi Publik mengalami kenaikan urutan dari 3 ke 2 kategori Pemerintah Kabupaten/Kota. Sedangkan secara skor mengalami Kenaikan skor nilai sebesar 3,94. Capaian target indikator Predikat Keterbukaan Informasi Publik pada tahun 2024 terhadap target tahun 2026 sebesar 100%

Meskipun demikian masih terdapat beberapa hambatan dalam pengelolaan Keterbukaan Informasi Publik diantaranya Belum maksimalnya pemanfaatan aplikasi SP4N Lapor dan Jumlah SDM Pengelola PPID pada perangkat daerah yang belum memadai. Adapun faktor pendorong keberhasilan indikator diatas antara lain sebagai berikut:

- 1) Pengelolaan PPID sebagai unit kerja pengelola dan penyelenggara keterbukaan informasi publik perangkat daerah telah dilaksanakan sesuai dengan aturan yang berlaku.
- 2) Standar Pelayanan Informasi Publik di Perangkat Daerah telah difungsikan sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pelayanan Publik sehingga masyarakat dapat lebih mudah untuk mengakses informasi.
- 3) Pengelolaan Aspirasi dan Pengaduan Pelayanan Publik Masyarakat yang disampaikan melalui aplikasi e-LAPOR akan langsung didistribusikan kepada perangkat daerah terkait agar segera ditindaklanjuti.

Keberhasilan capaian Sasaran 3, dengan Indikator tersebut diatas didukung oleh keberhasilan program, kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut:

Tabel 3.11

Capaian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan terhadap Sasaran 3

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja (%)
-1	-2	-3	-4	-5	(6=5/4*100)
1	Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	Persentase Perangkat Daerah dengan PPID Aktif	72,09	74,42	100
		Persentase Pengaduan yang di tindak lanjuti	100	100	100
1.1	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Perangkat Daerah dengan PPID Aktif	31	32	100
		Persentase Pengaduan yang di tindak lanjuti	100	100	100
1.1.1	Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	1 Dokumen	1 Dokumen	100
1.1.2	Pelayanan Informasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Informasi Publik	1 Dokumen	1 Dokumen	100
1.1.3	Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan	Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan	1 Dokumen	1 Dokumen	100
2	Program Penyelenggaraan Statistik Sektor	Persentase Data Statistik Sektor Perangkat Daerah yang tersedia	68,75	34,38	50,01
2.1	Kegiatan Penyelenggaraan Statistik Sektor di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Perangkat Daerah yang menginformasikan Data Statistik Sektor	22 OPD	11 OPD	50,00
2.1.1	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengelolaan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektor	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektor	5 Dokumen	3 Dokumen	60

Program Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik juga memiliki 2 (dua) indikator program yaitu :

- (1) Persentase Perangkat Daerah dengan PPID Aktif

Pada indikator program Persentase Perangkat Daerah dengan PPID Aktif, dari target 72,09% terealisasi sebesar 74,42% melebihi dari target yang telah ditentukan. Pencapaian ini diperoleh dari jumlah perangkat daerah yang telah

melaksanakan pengelola dan penyelenggara keterbukaan informasi publik melalui penerbitan Surat Keputusan masing-masing perangkat daerah. Adapaun surat keputusan yang terbit sampai dengan tahun 2024 yaitu sebanyak 32 perangkat Daerah.

Metadata :

Jumlah Perangkat Daerah dengan Surat Keputusan PPID = 32

Jumlah Perangkat Daerah= 43

Formula Penghitungan

(Jumlah Perangkat Daerah dengan Surat Keputusan PPID dibagi Jumlah Perangkat Daerah) x 100%

Hasil Perhitungan = $32/43 \times 100\% = 74,42$

(2) Persentase Pengaduan yang di tindak lanjuti

Pada indikator program pengaduan yang ditindaklanjuti,dari target 100% terealisasi sebesar 100% sesuai dengan target yang telah ditentukan. Pencapaian ini diperoleh dari jumlah pengaduan yang ditindaklanjuti tahun 2024 sebanyak 8 Pengaduan.

Metadata :

Jumlah Pengaduan yang ditindaklanjuti = 8

Jumlah Pengaduan yang masuk = 8

Formula Penghitungan

(Jumlah Pengaduan yang ditindaklanjuti dibagi Jumlah pengaduan yang masuk) x 100%

Hasil Perhitungan = $8/8 \times 100\% = 100$

Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral memiliki 1 (satu) indikator program yaitu :

(1) Persentase Data Statistik Sektoral Perangkat Daerah yang tersedia

Pada indikator program Persentase Data Statistik Sektoral Perangkat Daerah yang tersedia ,dari target 68,75% terealisasi sebesar 34,38% lebih rendah dari target yang telah ditentukan. Kegagalan ini dikarenakan pada tahun 2024 jumlah perangkat daerah yang menyediakan data statistik sektoral hanya 11 perangkat daerah dari target 22 perangkat daerah yang menyediakan data.

Metadata :

Jumlah Perangkat Daerah yang menginformasikan Data Statistik Sektoral =11

Jumlah Perangkat Daerah = 32

Formula Penghitungan

(Jumlah Perangkat Daerah yang menginformasikan Data Statistik Sektoral dibagi Jumlah Perangkat Daerah) x 100%

Hasil Perhitungan = $11/32 \times 100\% = 34,38$

Faktor Pendukung Keberhasilan

1. Standar Pelayanan Informasi Publik di Perangkat Daerah telah difungsikan
2. Pelaksanaan Inventarisasi Daftar Informasi Publik pada Perangkat Daerah
3. Kerjasama dan Koordinasi secara intensif dengan Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Tanjung Jabung Timur

Faktor Penghambat Keberhasilan

1. Belum maksimalnya pemanfaatan aplikasi SP4N Lapor
2. Jumlah SDM Pengelola PPID pada perangkat daerah yang belum memadai.
3. Dukungan Anggaran untuk belanja Publikasi (Media) yang belum Optimal
4. Terbatasnya peralatan peliputan publikasi penyelenggaraan dan pembangunan pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
5. Perubahan Template Data pada BPS dan kurangnya SDM yang berkompeten di bidang pengelolaan data statistik sektoral.

3.2 Realisasi Anggaran

Untuk mencapai indikator keberhasilan sebagaimana yang telah diuraikan diatas, selain faktor pendukung, aspek keuangan sangat berpengaruh untuk mencapai indikator keberhasilan dimaksud, hal ini karena operasionalisasi kegiatan dapat dilaksanakan apabila didukung dengan pembiayaan yang memadai. Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanjung Jabung Timur melaksanakan 5 (lima) program, 11 (sebelas) kegiatan dan 34 (tiga puluh empat) Sub Kegiatan. Dengan Total APBD sebesar Rp. 7.081.739.367,00 yang terdiri dari Belanja Operasi sebesar Rp. 6.923.917.427,00 dan Belanja Modal sebesar Rp.157.821.940,00. Adapun realisasi anggaran Tahun 2024 sebesar Rp. 6.843.212.378,00 (96,63%) dengan rincian belanja operasi sebesar

Rp. 6.694.194.378,00 (96,68%) dan belanja modal sebesar Rp. 149.018.000,00 (94,42%). Penjabaran program dan kegiatan pagu serta realisasi Tahun Anggaran 2024 di sajikan pada tabel berikut :

Tabel 3.12
Realisasi Anggaran yang mendukung secara langsung Sasaran Strategis
Tahun Anggaran 2024

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Capaian Anggaran (Rp)
-1	-2	-3	-4	-5	(9=5/4*100)
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Indeks Pelayanan Instansi	3.496.196.952	3.358.129.701	96,05
1.1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Perangkat Daerah	18.446.200	18.101.200	98,13
1.1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3.036.900	2.871.900	94,57
1.1.2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2.517.500	2.517.500	100
1.1.3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2.517.500	2.337.500	92,85
1.1.4	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1.600.000	1.600.000	100
1.1.5	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1.654.300	1.654.300	100
1.1.6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3.120.000	3.120.000	100
1.1.7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4.000.000	4.000.000	100,00

1.2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Penyelesaian Administrasi Keuangan Daerah	2.767.334.379	2.670.021.501	96,48
1.2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	2.091.889.579	1.994.576.701	95,35
1.2.2	Pelaksanaan Penatausahaan dan Penguji/ Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	673.540.000	673.540.000	100
1.2.3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1.904.800	1.904.800	100
1.3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Penyelesaian Adminstrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	57.300.000	51.800.000	90,40
1.3.1	Pengadaan Pakain Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	27.300.000	27.300.000	100
1.3.2	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	30.000.000	24.500.000	81,67
1.4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Penyelesaian Administrasi Umum Daerah	197.741.233	196.707.343	99,48
1.4.1	Penyediaan Komponen Instalansi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang	5.760.200	5.730.900	99,49
1.4.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	39.638.095	38.769.550	97,81
1.4.3	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	16.162.938	16.027.400	99,16
1.4.4	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undang	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang disediakan	3.600.000	3.600.000	100
1.4.5	Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	2.580.000	2.580.000	100
1.4.6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	130.000.000	129.999.493	100
1.5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah	102.821.940	94.073.000	91,49
1.5.1	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	25.000.000	20.773.000	83,09
1.5.2	Pengadaan Mebel	Jumlah Unit Mebel yang disediakan	32.373.240	30.200.000	93,29
1.5.3	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan	45.448.700	43.100.000	94,83
1.6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	203.100.000	191.199.107	94,14
1.6.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.500.000	1.500.000	100
1.6.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	201.600.000	189.699.107	94,10
1.7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah	149.453.200	136.227.550	91,15
1.7.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	76.370.000	71.713.600	93,90
1.7.2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional/	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	24.660.000	23.993.700	97,30

1.7.3	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	22.923.200	18.855.250	82,25
1.7.4	Pemeliharaan Rehab Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	25.500.000	21.665.000	84,96
2	Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	Persentase Perangkat Daerah dengan PPID Aktif	1.912.087.115	1.856.521.539	97,09
		Persentase Pengaduan yang di tindak lanjuti			
2.1	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Perangkat Daerah dengan PPID Aktif	1.912.087.115	1.856.521.539	97,09
		Persentase Pengaduan yang di tindak lanjuti			
2.1.1	Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	1.812.313.115	1.780.762.128	98,26
2.1.2	Pelayanan Informasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Informasi Publik	55.424.000	35.247.600	63,60
2.1.3	Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan	Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan	44.350.000	40.511.811	91,35
3	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Persentase Aplikasi yang terintegrasi	1.538.800.900	1.515.352.425	98,48
		Persentase Sarpras Pendukung SPBE			
3.1	Pengelolaan E - Government di Lingkup Pemerintah Daerah	Aplikasi yang terintegrasi	1.538.800.900	1.515.352.425	98,48
		Jumlah Sarpras Pendukung SPBE			
3.1.1	Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah	1.473.201.000	1.452.168.437	98,57
3.1.2	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis	Jumlah Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik yang Dikembangkan	65.599.900	63.183.988	96,32
4	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Persentase Data Statistik Sektoral Perangkat Daerah yang tersedia	85.125.000	67.110.000	78,84
4.1	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Perangkat Daerah yang menginformasikan Data Statistik Sektoral	85.125.000	67.110.000	78,84
4.1.1	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengelolaan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengelolaan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	85.125.000	67.110.000	78,84
5	Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	Presentase Keamanan Sistem Informasi	49.529.400	46.098.713	93,07
5.1	Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Perangkat Daerah yang menggunakan Sertifikat Elektronik	49.529.400	46.098.713	93,07
5.1.1	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	49.529.400	46.098.713	93,07
JUMLAH			7.081.739.367	6.843.212.378	96,63

Dari hasil perhitungan yang telah dilaksanakan, diperoleh hasil pengukuran Pencapaian Kinerja Keuangan pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanjung Jabung Timur mencapai 96,63%, hal ini berarti tingkat keberhasilan pencapaian kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanjung Jabung Timur dinilai sangat baik.

3.3 Inovasi

Dalam pelaksanaan urusan pemerintahan dibidang Komunikasi dan Informatika, Urusan Statistik dan Urusan Persandian pada tahun 2024 Dinas Komunikasi dan Informatika Kabuapten Tanjung Jabung Timur telah membuat inovasi sebagai berikut:

Pada Tahun 2024 Dinas Komunikasi dan Informatika mengintegrasikan Aplikasi E Presensi sebagai absensi elektronik Pegawai pada pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur dengan Sistem Aplikasi kinerja BKN sehingga dapat memungkinkan langsung terjadi pertukaran data secara otomatis pada kedua aplikasi tersebut serta lebih mudah dalam pemantauan.

3.4 Prestasi dan Penghargaan Dinas Komunikasi dan Informatika

Prestasi yang dicapai pada Tahun 2024 Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten tanjung Jabung Timur yakni Penghargaan Keterbukaan Informasi Publik Tingkat Provinsi Jambi dengan Kategori Informatif.

Gambar 3.3
Penghargaan Keterbukaan Informasi Publik



BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan Umum

Berdasarkan hasil evaluasi dan analisis kinerja pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanjung Jabung Timur tahun 2024 dapat diperoleh kesimpulan bahwa:

1. Pencapaian sasaran kinerja utama Dinas Komunikasi dan Informatika pada tahun 2024 nilai berdasarkan Surat Keputusan Menteri PAN-RB nomor 663 Tahun 2024 tentang hasil evaluasi SPBE pada Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah Tahun 2024, Kabupaten Tanjung Jabung Timur memperoleh nilai 2,83 ini menunjukkan bahwa nilai SPBE Kabupaten Tanjung Jabung Timur termasuk kategori “Baik” meskipun demikian secara keseluruhan penerapan aspek SPBE pada Dinas Komunikasi dan Informatika masih perlu perbaikan dan peningkatan dalam penyelenggaraan sistem pemerintah berbasis elektronik di Kabupaten Tanjung Jabung Timur Khususnya pada Dinas Komunikasi dan Informatika. Untuk nilai IKM terhadap layanan komunikasi dan informatika adalah 88,03. Hal ini menunjukkan bahwa mutu pelayanan termasuk kategori B sehingga kinerja pelayanan untuk tahun 2024 dapat dikatakan Baik. Sementara untuk capaian sasaran Predikat Keterbukaan Informasi Publik adalah Informatif.
2. Dinilai dari sisi Akuntabilitas Keuangan, realisasi anggaran Belanja atas pelaksanaan program, Kegiatan dan sub kegiatan pada tahun 2024 sebesar Rp. 6.843.212.378,00 atau sebesar 96,63%. Persentase realisasi anggaran belanja tahun 2024 menurun jika dibandingkan dengan serapan anggaran belanja pada tahun sebelumnya yang hanya sebesar 97,89%.ini dikarenakan ada beberapa rekening belanja yang tidak dapat direalisasikan dengan penyebab kekurangan waktu pelaksanaan.
3. Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan menunjukkan bahwa capain kinerja terhadap sasaran Dinas komunikasi dan Informatika, rata-rata tercapai sesuai dengan target yang ditetapkan. Namun pada Program Penyelenggaraan Statistik Sektorial masih terdapat kendala sehingga pencapaian kinerjanya masih kurang. Adapun hambatannya karena Perubahan Template Data pada BPS dan kurangnya SDM yang berkompeten di bidang Pengelolaan Data Statistik Sektorial

4.2 Strategi Peningkatan Kinerja

Kinerja yang telah dicapai pada tahun 2024 diharapkan dapat ditingkatkan. Demikian pula kegagalan yang dialami dalam pelaksanaan program dan kegiatan dapat diperbaiki pada tahun 2025. Dalam mengantisipasi dan meminimalkan permasalahan/kendala yang telah terjadi dilaksanakan upaya pemecahan masalah. Untuk meningkatkan hasil yang telah dicapai, ada beberapa hal yang perlu mendapat perhatian antara lain:

1. Perlu adanya komitmen kuat dari segenap jajaran pimpinan untuk dapat melakukan implementasi SPBE diseluruh perangkat daerah yang sesuai dengan aturan yang berlaku.
2. Memaksimalkan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan berbasis Elektronik
3. Memaksimalkan Dukungan anggaran untuk sarana dan prasarana pelayanan akses internet perkantoran dan kecamatan serta Pengembangan SDM di bidang TIK
4. Memaksimalkan Dukungan Anggaran untuk belanja Publikasi (Media).
5. Mengoptimalkan perangkat daerah dalam memahami pentingnya penggunaan layanan persandian untuk keamanan informasi dalam pelayanan informasi publik pemerintah
6. Mengoptimalkan Peralatan peliputan publikasi penyelenggaraan dan pembangunan pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
7. Melaksanakan Sosialisasi terkait Data statistik Sektoral kepada Produsen Data dan Pengembangan SDM di bidang Pengelolaan Data dan Statistik Sektoral

Sebagai akhir kata, kami selaku Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanjung Jabung Timur beserta jajaran mengharap agar LKjIP Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2024 ini dapat memenuhi kewajiban akuntabilitas kepada para stakeholders dan sebagai sumber informasi penting dalam pengambilan keputusan guna peningkatan kinerja dalam mewujudkan akuntabilitas kinerja pada tahun mendatang.

Muara Sabak, 31 Januari 2025
Kepala,

Herman Ton, S.E, M.E
NIP. 19780420 200212 1 005

LAMPIRAN

Indikator Kinerja Utama
Dinas Komunikasi dan Informatika
Tahun 2021-2026

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Formula	Target					
					2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Meningkatkan Penyelenggaraan Pemerintahan Berbasis Elektronik	Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Berbasis Elektronik	Indeks SPBE	1. Domain Kebijakan SPBE dengan Aspek Kebijakan Internal Tata Kelola SPBE 2. Domain Tata Kelola SPBE yang terdiri dari 3 Aspek yaitu; Aspek Perencanaan Strategis SPBE, Aspek Teknologi Informasi dan Komunikasi, dan Aspek Penyelenggara SPBE 3. Domain Manajemen SPBE yang terdiri dari 2 Aspek yaitu; Aspek Penerapan Manajemen SPBE dan Aspek Pelaksanaan Audit TIK 4. Domain Layanan SPBE yang terdiri dari 2 Aspek yaitu; Aspek Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik dan Aspek Layanan Publik Berbasis Elektronik	2,6	2,6	2,6	2,6	3,5	3,5
2	Meningkatnya Pelayanan Publik Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	Peningkatan Pelayanan Publik, Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	Nilai IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat)	Survey	78	81	84	88,3	90	93
			Predikat Akuntabilitas Kinerja (AKIP)	Penilaian Inspektorat	B	B	B	B	BB	BB
			Laporan Keuangan Sesuai SAP	Penilaian Bakeuda	Sesuai	Sesuai	Sesuai	Sesuai	Sesuai	Sesuai
3	Meningkatnya Pelayanan Informasi dan Komunikasi Publik	Peningkatan Kualitas keterbukaan Informasi publik	Predikat Keterbukaan Informasi Publik	Penilaian Komisi Informasi	Cukup Informatif	Cukup Informatif	Cukup Informatif	Cukup Informatif	Menuju Informatif	Menuju Informatif

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Tanjung Jabung Timur


Herni Joni, S.E, M.E
NIP. 19780420 200212 1 005

**PERNYATAAN PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR**



PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : **HERMAN TONI, S.E, M.E**
Jabatan : Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Tanjung Jabung Timur

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **H. ROMI HARIYANTO, S.E**
Jabatan : Bupati Tanjung Jabung Timur

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Muara Sabak, Oktober 2024

Pihak Pertama,

~~Pihak Kedua,~~


H. ROMI HARIYANTO, S.E


HERMAN TONI, S.E, M.E

**PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR
TAHUN 2024**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
I	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja	Indeks SPBE	Baik
	1 Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Berbasis Elektronik	Nilai SPBE	2,6
II	Meningkatnya Pelayanan Publik dan Budaya Kerja Aparatur	Indeks Pelayanan Publik	3,4
	1 Peningkatan Pelayanan Publik, Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	Skor IKM Nilai AKIP Lap. Keuangan Sesuai SAP	88,3 B Sesuai
	2 Peningkatan Kualitas Keterbukaan Informasi Publik	Predikat Keterbukaan Informasi Publik	Cukup Informatif

Jumlah Perubahan APBD Tahun 2024 sebesar Rp. 7.081.739.367,00 yang terdiri dari :

1. Belanja Operasi sebesar Rp. 6.923.917.427,00
2. Belanja Modal sebesar Rp. 157.821.940,00

No	Program	Anggaran	Ket
1.	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	3.496.196.952	
2.	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	1.912.087.115	
3.	Pengelolaan Aplikasi Informatika	1.538.800.900	
4.	Penyelenggaraan Statistik Sektoral	85.125.000	
5.	Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	49.529.400	
Jumlah		7.081.739.367	


 Bupati Tanjung Jabung Timur
H. ROMI HARIYANTO, S.E

Muara Sabak, Oktober 2024
 Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika

HERMAN TONI, S.E, M.E

**PERUBAHAN RENCANA AKSI DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
TAHUN ANGGARAN 2024**

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET PER TRIWULAN				NO	AKSI KEGIATAN	PROGRAM /KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET (OUTPUT/ KELUARAN)	TARGET INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN PER TRIWULAN				ANGGARAN
			TW 1	TW 2	TW 3	TW 4						TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	
1	Peningkatan Pelayanan Publik, Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	Nilai IKM	-	-	-	88,3	1	Meningkatnya Pelayanan Publik, Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Pelayanan Instansi	88,3 Point	-	-	-	88,3	3.496.196.952
		Predikat AKIP	-	-	-	B	2	Tersusunnya dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Dinas KOMINFO	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Perangkat Daerah	100 Persen	14,29%	28,57%	28,57%	28,57%	18.446.200
		Lap. Keuangan Sesuai SAP	-	-	-	Sesuai	3	Tersusunnya Dokumen Renja dan Renja Perubahan Dinas KOMINFO	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	-	1 Dokumen	1 Dokumen	-	3.036.900
							4	Tersusunnya Dokumen RKA Dinas KOMINFO	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	-	-	1 Dokumen	-	2.517.500
							5	Tersusunnya Dokumen Perubahan RKA Dinas KOMINFO	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	-	1 Dokumen	-	-	2.517.500
							6	Tersusunnya Dokumen DPA Dinas KOMINFO	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	-	-	-	1.600.000
							7	Tersusunnya Dokumen Perubahan DPA Dinas KOMINFO	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	-	-	1 Dokumen	-	1.654.300
							8	Tersusunnya Dokumen LKJP dan LKJIP Dinas KOMINFO	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	-	-	3.120.000
							9	Terlaksananya Evaluasi Kinerja Dinas KOMINFO	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	-	-	-	1 Laporan	4.000.000
							10	Penyediaan Gaji dan Tunjangan dan tersusunnya Laporan Keuangan	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Penyelesaian Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 Persen	25%	25%	25%	25%	2.767.334.379
							11	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	17 Orang	17 Orang	17 Orang	17 Orang	17 Orang	2.091.889.579
							12	Terlaksananya Penatausahaan dan pengujian/Verifikasi Keuangan Dinas KOMINFO	Pelaksanaan Penatausahaan dan pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	-	-	-	1 Dokumen	673.540.000
							13	Tersusunnya Laporan Keuangan Dinas KOMINFO	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1 Laporan	-	-	-	1.904.800
							14	Terselesaikannya Administrasi Kepegawaian Dinas KOMINFO	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Penyelesaian Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 Persen	33,33%	-	33,33%	33,33%	57.300.000
							15	Terlaksananya Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Perlengkapannya	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Perlengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	-	-	-	1 Paket	27.300.000
							16	Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	6 Orang	2 Orang	-	3 Orang	-	30.000.000
							17	Terselesaikannya Administrasi Umum Dinas KOMINFO	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Penyelesaian Administrasi Umum Daerah	100 Persen	25%	25%	25%	25%	197.741.233
							18	Terlaksananya Penyediaan Komponen Instalansi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Penyediaan Komponen Instalansi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalansi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	1 Paket	-	1 Paket	-	-	5.760.200
							19	Terlaksananya Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Kantor	Penyediaan peralatan dan kelengkapan kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	2 Paket	-	1 Paket	1 Paket	-	39.638.095
							20	Terlaksananya Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	1 Paket	-	1 Paket	-	-	16.162.938
							21	Terlaksananya Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undang	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undang	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undang yang disediakan	1 Dokumen	-	-	-	1 Dokumen	3.600.000
							22	Terlaksananya Penyediaan Fasilitas Kunjungan Tamu	Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	1 Laporan	-	-	-	1 Laporan	2.580.000
							23	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dinas KOMINFO	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	-	-	-	1 Laporan	130.000.000

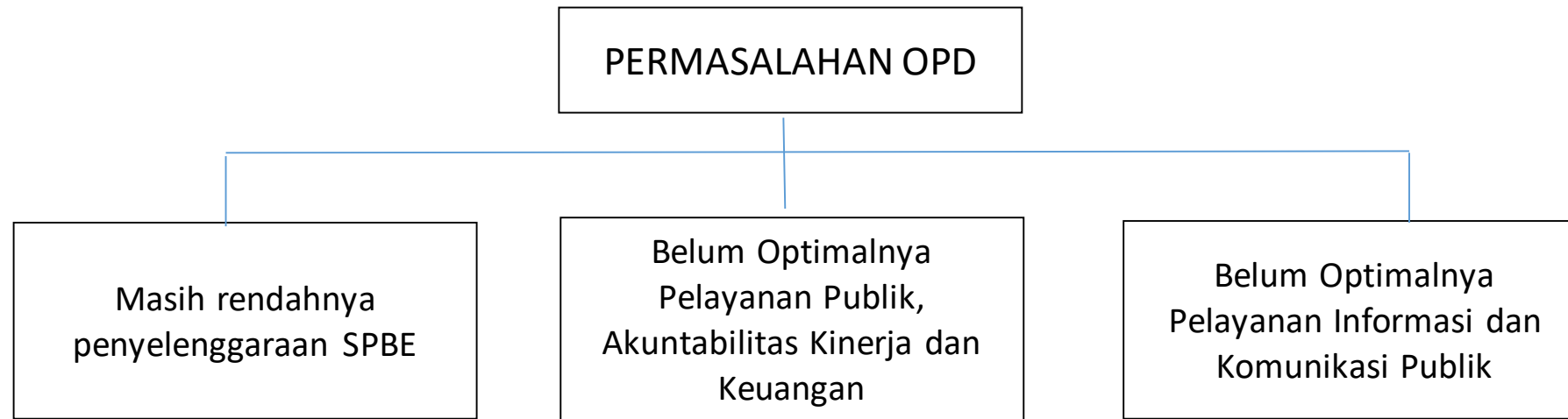
NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET PER TRIWULAN				NO	AKSI KEGIATAN	PROGRAM /KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET (OUTPUT/ KELUARAN)	TARGET INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN PER TRIWULAN				ANGGARAN
			TW 1	TW 2	TW 3	TW 4						TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	
							24	Terselesainya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah	100 Persen	-	-	80%	20%	102.821.940
							25	Terlaksananya Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit	-	-	-	1 Unit	25.000.000
							26	Terlaksananya Pengadaan Mebel	Pengadaan Mebel	Jumlah Pengadaan Mebel yang Disediakan	11 Unit	-	-	11 unit	-	32.373.240
							27	Terlaksananya Pengadaan Peralatan Dan Mesin Lainnya	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	3 Unit	-	-	1 unit	2 unit	45.448.700
							28	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 Persen	-	-	-	100%	203.100.000
							29	Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	-	-	-	1 Laporan	1.500.000
							30	Terlaksananya Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	-	-	-	1 Laporan	201.600.000
							31	Tersedianya Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah	100 Persen	25%	25%	25%	25%	149.453.200
							32	Terlaksananya Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	2 Unit	2 Unit	2 Unit	2 Unit	2 Unit	76.370.000
							33	Terlaksananya Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Oprasional atau Lapangan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Oprasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	6 Unit	6 Unit	6 Unit	6 Unit	6 Unit	24.660.000
							34	Terlaksananya Penyediaan Jasa Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	18 Unit	1 Unit	9 Unit	1 Unit	9 Unit	22.923.200
							35	Terlaksananya Pemeliharaan Gedung Kantor	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	-	-	-	1 Unit	25.500.000
2	Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Berbasis Elektronik	Nilai SPBE	-	-	-	2,6	1	Melaksanakan Penyelenggaraan Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Persentase Aplikasi yang terintegrasi	75	-	-	-	75	1.538.800.900
										Persentase Sarpras Pendukung SPBE	100	-	-	-	100	
							2	Terintegrasinya Aplikasi dan Tersedianya Sarana dan Prasarana pendukung SPBE	Pengelolaan e - government di lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Aplikasi yang terintegrasi	1	-	-	-	1	1.538.800.900
										Jumlah Sarpras Pendukung SPBE	1	-	-	-	1	
							3	Terselenggaranya Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah	Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah	1 Dokumen	-	-	-	1 Dokumen	1.473.201.000
							4	Terlaksananya Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Jumlah Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik yang Dikembangkan	1 Unit	-	-	-	1 Unit	65.599.900
							5	Meningkatkan Keamanan sistem Informasi Pemerintah Daerah	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Persentase Keamanan Sistem Informasi	37,21	-	-	-	37,21	49.529.400
3	Peningkatan Kualitas Keterbukaan Informasi Publik	Predikat Keterbukaan Informasi Publik	-	-	-	Cukup Informatif	6	Menerapkan Pengamanan Informasi melalui sertifikat elektronik	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Perangkat Daerah yang menggunakan Sertifikat Elektronik	16	-	-	-	16	49.529.400
							7	Melaksanakan Pengamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten Berbasis Elektronik	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	1 Laporan	-	-	-	1 Laporan	49.529.400
							1	Melaksanakan Keterbukaan Informasi Publik Pemerintah Daerah	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Persentase Perangkat Daerah dengan PPID Aktif	72,09	-	-	-	72,09	1.912.087.115
										Persentase Pengaduan yang ditindaklanjuti	100	25%	25%	25%	25%	
							2	Terlaksananya Keterbukaan Informasi Publik Perangkat Daerah dan Layanan Aspirasi Publik	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Perangkat Daerah dengan PPID Aktif	31	-	-	-	72,09	1.912.087.115
										Persentase Pengaduan yang ditindaklanjuti	100	25%	25%	25%	25%	
							3	Terlaksananya Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	1 Dokumen	-	-	-	1 Dokumen	1.812.313.115

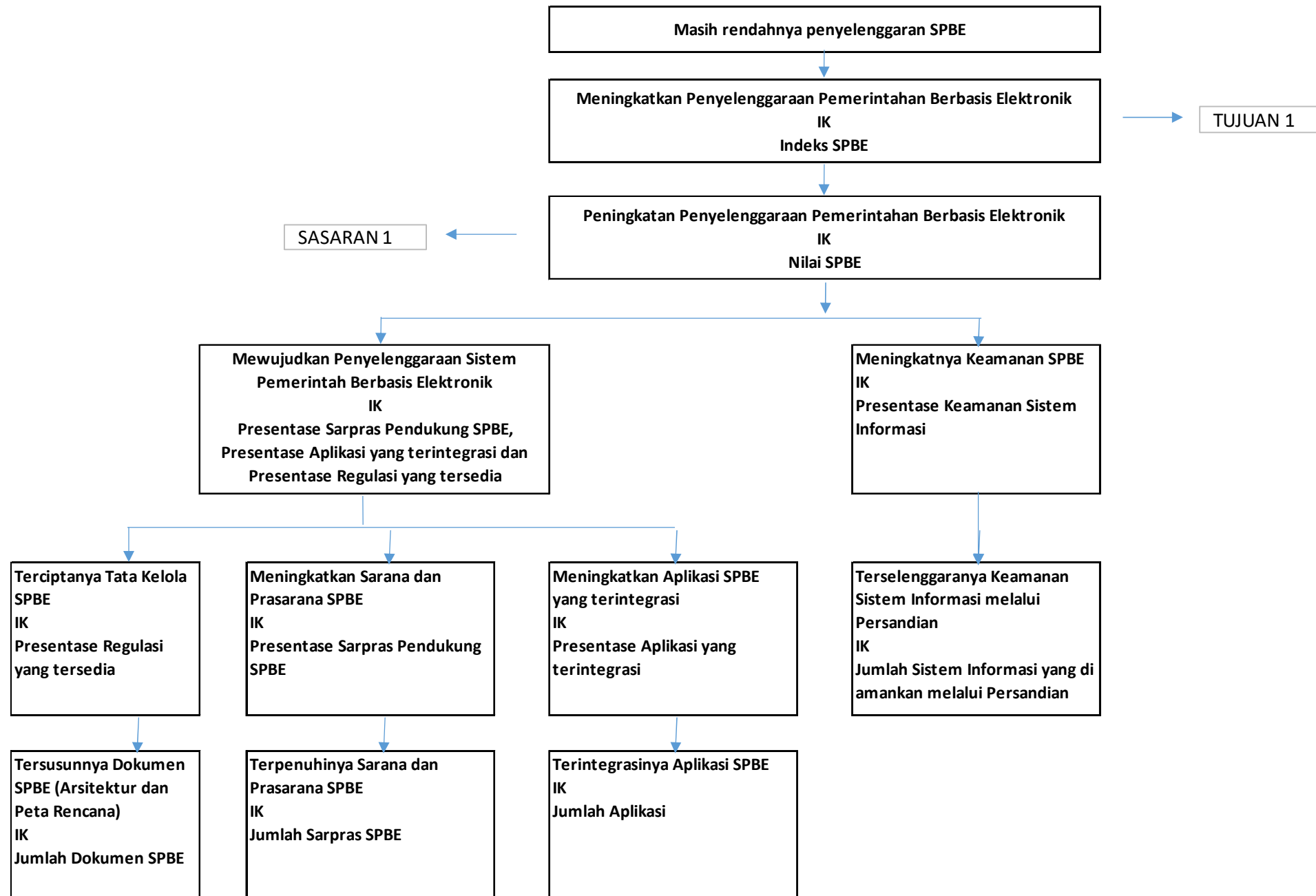
NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET PER TRIWULAN				NO	AKSI KEGIATAN	PROGRAM /KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET (OUTPUT/ KELUARAN)	TARGET INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN PER TRIWULAN				ANGGARAN
			TW 1	TW 2	TW 3	TW 4						TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	
							4	Terlaksananya Pelayanan Pengaduan dan Informasi Publik	Pelayanan Informasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Informasi Publik	1 Dokumen	-	-	-	1 Dokumen	55.424.000
							5	Terjalinnnya Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan	Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan	Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan	1 Dokumen	-	-	-	1 Dokumen	44.350.000
							6	Menyediakan Data Statistik Sektoral Kabupaten Tanjung Jabung Timur	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Presentase Data Statistik Sektoral Perangkat Daerah yang tersedia	68,75	-	-	-	68,75%	85.125.000
							7	Terpenuhinya data statistik sektoral perangkat daerah	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Perangkat Daerah yang menginformasikan data statistik sektoral	16	16	-	-	-	85.125.000
							8	Tersusunnya data Statistik Sektoral	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengelolaan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengelolaan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	5 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	2 Dokumen	85.125.000
TOTAL																7.081.739.367

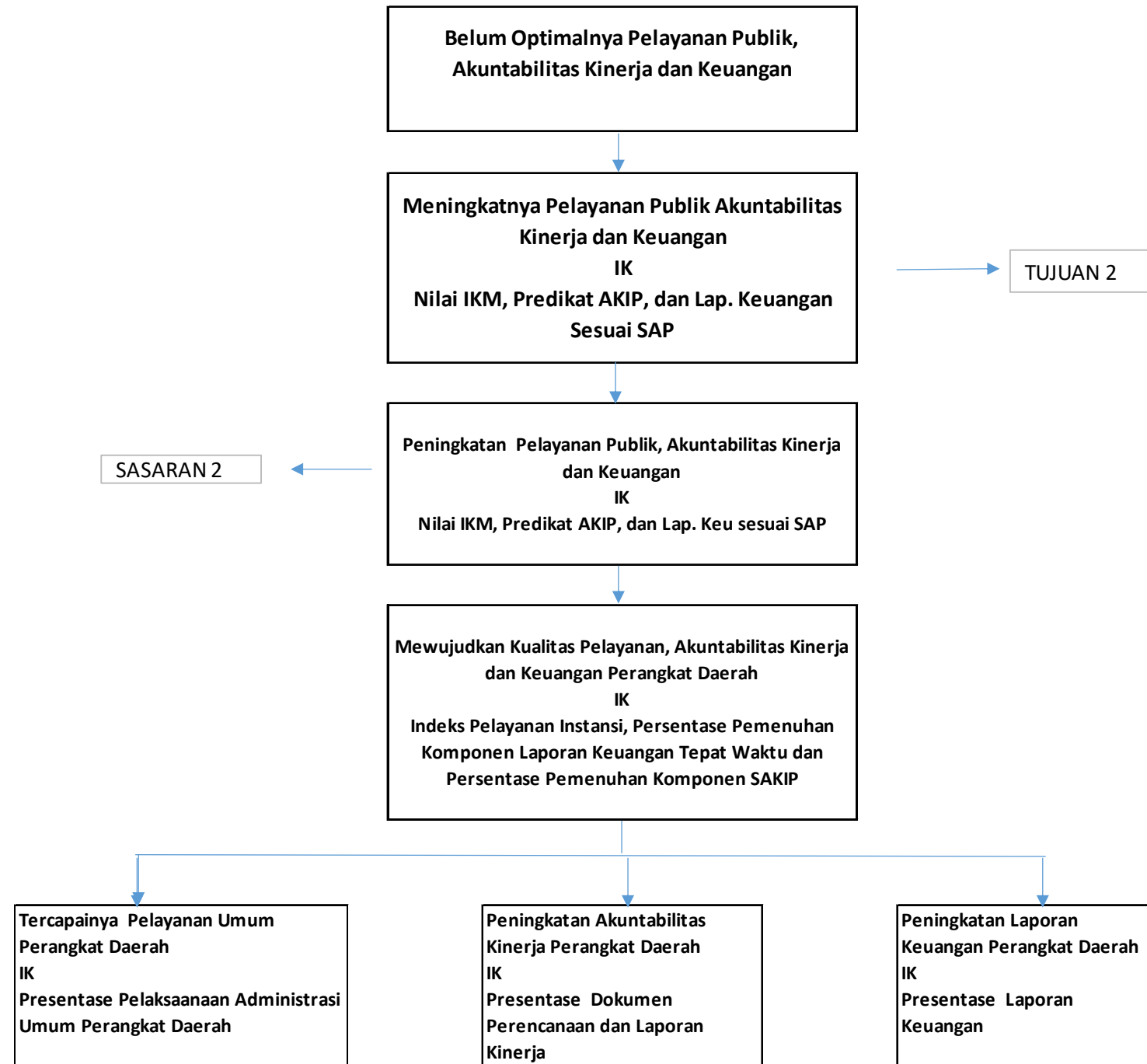
Muara Sabak, Oktober 2024
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika

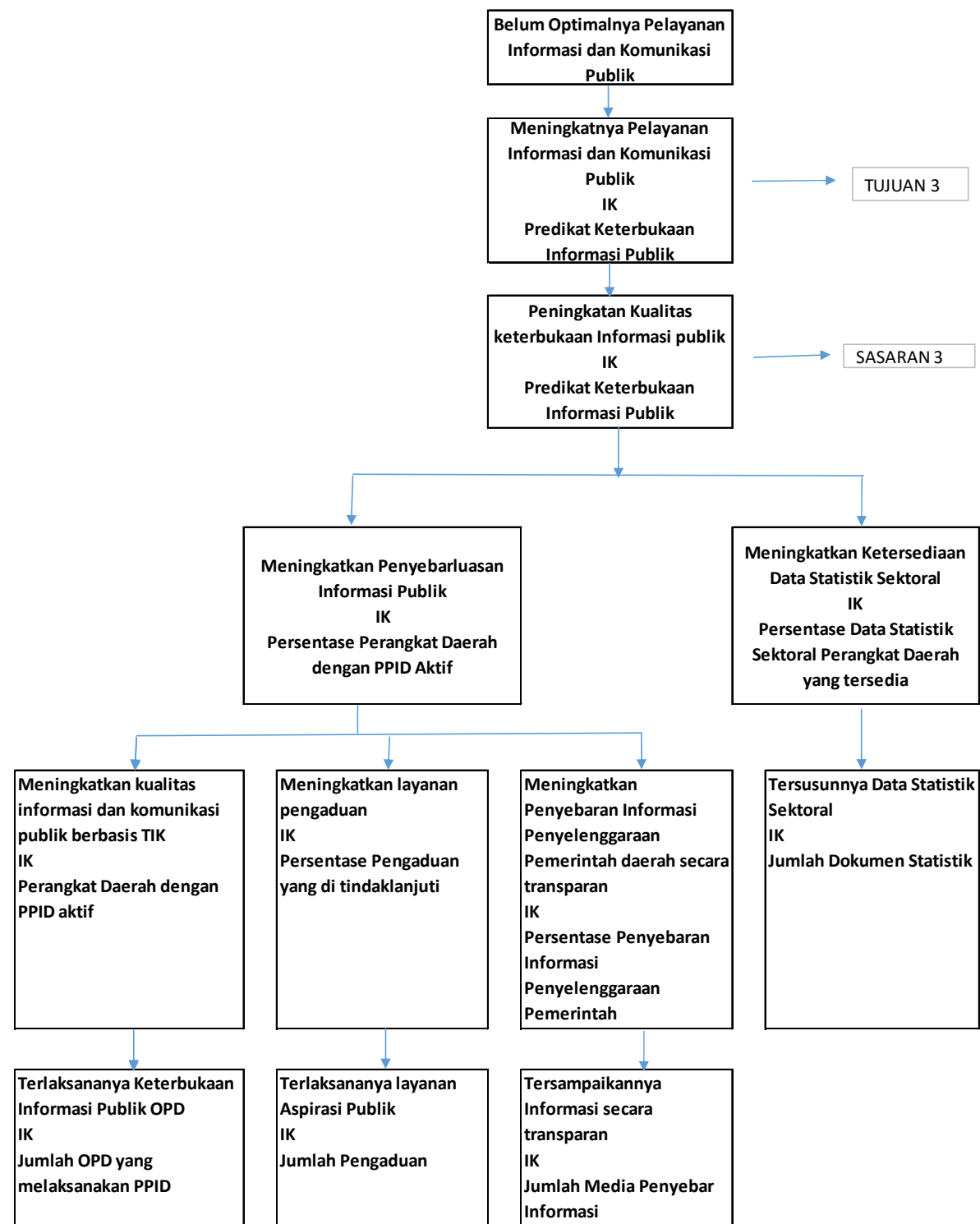

Raden Toni, S.E., M.E.
Pembina Utama Muda
NIP. 19780420 200212 1 005

POHON KINERJA
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR
TAHUN 2021 – 2026









CASCADING
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR
TAHUN ANGGARAN 2024

VISI
Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Tanjung Jabung Timur



MISI IV
Mewujudkan Reformasi Birokrasi Guna Peningkatkan Pelayanan Publik dalam Tata-
natan Kehidupan Yang Nyaman dan Harmonis



Tujuan 1
Peningkatan Pengawasan, Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan
Indikator Tujuan
Indeks SPBE



Sasaran 1
Peningkatan Pengawasan, Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan
Indikator Sasaran
Indeks SPBE

Tujuan 2
Meningkatnya Pelayanan Publik dan Budaya Kerja Aparatur
Indikator Tujuan
Indeks Pelayanan Publik



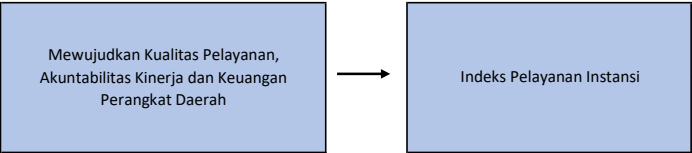
Sasaran 2
Meningkatnya Pelayanan Publik dan Budaya Kerja Aparatur
Indikator Sasaran
Indeks Pelayanan Publik

Sasaran Strategis	
Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Berbasis Elektronik	
Indikator	Target
Nilai SPBE	2,6

Sasaran Strategis	
Peningkatan Pelayanan Publik, Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	
Indikator	Target
Skor IKM	88,3
Nilai AKIP	B
Lap. Keuangan Sesuai SAP	Sesuai

Sasaran Strategis	
Peningkatan Kualitas Keterbukaan Informasi Publik	
Indikator	Target
Predikat Keterbukaan Informasi Publik	Cukup Informatif

ESSELON III
SASARAN PROGRAM
INDIKATOR KINERJA PROGRAM
SEKRETARIS



ESSELON IV				
SASARAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA SUB KEGIATAN	TARGET	ANGGARAN	
Terlaksananya Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Perlengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	Rp	27.300.000
Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	6 Orang	Rp	30.000.000
Terlaksananya Penyediaan Komponen Instalansi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang	1 Paket	Rp	5.760.200
Terlaksananya Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	2 Paket	Rp	39.638.095
Terlaksananya Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	1 Paket	Rp	16.162.938
Terlaksananya Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undang	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang disediakan	1 Dokumen	Rp	3.600.000
Terlaksananya Penyediaan Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	1 Laporan	Rp	2.580.000
Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dinas KOMINFO	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	Rp	130.000.000
Terlaksananya Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit	Rp	25.000.000
Terlaksananya Pengadaan Mebel	Jumlah Pengadaan Mebel yang Disediakan	11 Unit	Rp	32.373.240
Terlaksananya Pengadaan Peralatan Dan Mesin Lainnya	Jumlah Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	3 Unit	Rp	45.448.700
Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	Rp	1.500.000
Terlaksananya Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	Rp	201.600.000
Terlaksananya Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	2 Unit	Rp	76.370.000
Terlaksananya Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Oprasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	6 Unit	Rp	24.660.000
Terlaksananya Penyediaan Jasa Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	18 Unit	Rp	22.923.200
Terlaksananya Pemeliharaan Gedung Kantor	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	Rp	25.500.000

ESSELON III	
SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM

SEKRETARIAT

Mewujudkan Kualitas Pelayanan,
Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan
Perangkat Daerah

Persentase Pemenuhan Komponen
SAKIP

ESSELON IV			
SASARAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA SUB KEGIATAN	TARGET	ANGGARAN

Tersusunnya Dokumen Renja dan Renja Perubahan Dinas KOMINFO	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	Rp 3.036.900
Tersusunnya Dokumen RKA Dinas KOMINFO	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	Rp 2.517.500
Tersusunnya Dokumen Perubahan RKA Dinas KOMINFO	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	Rp 2.517.500
Tersusunnya Dokumen DPA Dinas KOMINFO	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	Rp 1.600.000
Tersusunnya Dokumen Perubahan DPA Dinas KOMINFO	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	Rp 1.654.300
Tersusunnya Dokumen LKPJ dan LKjIP Dinas KOMINFO	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 Laporan	Rp 3.120.000
Terlaksananya Evaluasi Kinerja Dinas KOMINFO	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	Rp 4.000.000

ESSELON III	
SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM

Mewujudkan Kualitas Pelayanan,
Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan
Perangkat Daerah

Persentase Pemenuhan Komponen
Laporan Keuangan Tepat Waktu

ESSELON IV			
SASARAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA SUB KEGIATAN	TARGET	ANGGARAN

Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	17 Orang	Rp 2.091.889.579
Terlaksananya Penatausahaan dan pengujian/Verifikasi Keuangan Dinas KOMINFO	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	Rp 673.540.000
Tersusunnya Laporan Keuangan Dinas KOMINFO	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	Rp 1.904.800

ESSELON III	JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU
-------------	-----------------------------

BIDANG LAYANAN E-GOVERNMENT

SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	SASARAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA SUB KEGIATAN	TARGET	ANGGARAN
Mewujudkan Penyelenggaraan Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik	Presentase Aplikasi yang terintegrasi	Terlaksananya Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Jumlah Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik yang Dikembangkan	1 Aplikasi	65.599.900
Mewujudkan Penyelenggaraan Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik	Presentase Sarpras Pendukung SPBE	Terselenggranya Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah	1 Dokumen	1.473.201.000
Meningkatnya Keamanan SPBE	Presentase Keamanan Sistem Informasi	Melaksanakan Pengamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten Berbasis Elektronik	Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	1 Laporan	49.529.400

BIDANG PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK

SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	SASARAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA SUB KEGIATAN	TARGET	ANGGARAN
Meningkatkan Penyebarluasan Informasi Publik	Persentase Perangkat Daerah dengan PPID Aktif	Terlaksananya Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	1 Dokumen	1.812.313.115
		Terjalinnya Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan	Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan	1 Dokumen	44.350.000
Meningkatkan Penyebarluasan Informasi Publik	Persentase Pengaduan yang ditindaklanjuti	Terlaksananya Pelayanan Pengaduan dan Informasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Informasi Publik	1 Dokumen	55.424.000
Meningkatkan Ketersediaan Data Statisik Sektoral	Persentase Data Statistik Sektoral Perangkat Daerah yang tersedia	Tersusunnya data Statistik Sektoral	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	5 Dokumen	85.125.000